



*Handwritten signature*

**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SOSIAL**

**PEMBIMBING:**

**Milly Mildawati, Ph.D**

Oleh:

**MUHAMMAD FAUZAN DWIATMADJA**

**20.03.095**

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BANDUNG  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzan Dwiatmadja

NRP : 20.03.095

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial  
Program Sarjana Terapan

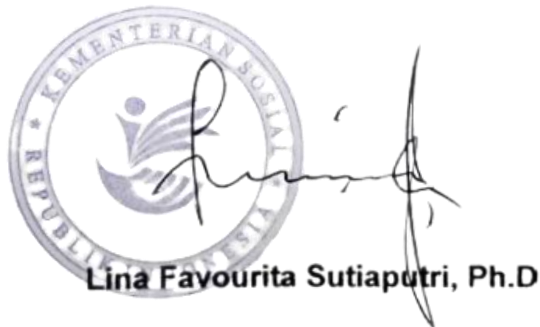
**Pembimbing:**



**Milly Mildawati, Ph.D**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial  
Program Sarjana Terapan  
Politeknik Kesejahteraan Bandung,**



**Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkat rahmat Allah dan hidayah-Nya, serta petunjuk dan kemudahan yang selalu diberikan oleh-Nya praktikan mampu melaksanakan Praktikum Laboratorium dengan tetap bersyukur dan mampu menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial ini dengan tepat waktu.

Tersusunnya laporan ini tentu bukan hanya karena buah kerja keras dari praktikan semata, melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait yang telah membantu praktikan dalam menyelesaikan laporan ini, diantaranya:

1. Dr. Marjuki, M.Sc, selaku Direktur Utama Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
3. Dra. Atirista Nainggolan, M.P selaku Ketua Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Milly Mildawati, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan pengorbanan waktu selama kegiatan praktikum laboratorium.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 4 yang selalu memberikan motivasi selama pelaksanaan praktikum laboratorium
6. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan mendoakan terlaksananya kegiatan praktikum laboratorium.

Mengingat dalam proses pembuatan laporan praktikum yang praktikan susun masih terdapat kekurangan dan tidak sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan diri untuk hasil akhir laporan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial.

Bandung, April 2023

Praktikan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Manfaat .....	2
C. Waktu dan Lokasi Praktikum .....	4
D. Proses Praktikum .....	5
1. Tahap Persiapan .....	5
2. Tahap Lapangan .....	6
3. Tahap Pasca Lapangan .....	14
E. Sistematika Laporan .....	14
<b>BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM</b> .....	15
A. Profil Analisis Jaminan Sosial .....	15
1. Gambaran Umum Masalah .....	15
2. Tinjauan Konsep .....	16
3. Asesmen .....	21
4. Rencana Intervensi .....	25
B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	36
1. Gambaran Umum Masalah .....	36
2. Tinjauan Konsep .....	37
3. Asesmen .....	44
4. Rencana Intervensi .....	47
C. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial .....	56
1. Gambaran Umum Masalah .....	56
2. Tinjauan Konsep .....	58
3. Asesmen .....	63
4. Rencana Intervensi .....	66
D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	74
1. Gambaran Umum Masalah .....	74
2. Tinjauan Konsep .....	75
3. Asesmen .....	82
4. Rencana Intervensi .....	87
E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	94
1. Gambaran Umum Masalah .....	94
2. Tinjauan Konsep .....	95
3. Asesmen .....	102

4. Rencana Intervensi .....	105
<b>BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Rekomendasi .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1.1 Sistem Partisipan Program Profil Analisis Jaminan Sosial .....	28
2.1.2.1 Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Jaminan Sosial 1 .....	29
2.1.2.2 Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Jaminan Sosial 2 .....	30
2.1.2.3 Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Jaminan Sosial 3 .....	30
2.1.3.1 Alat dan Bahan Profil Analisis Jaminan Sosial 1 .....	31
2.1.3.2 Alat dan Bahan Profil Analisis Jaminan Sosial 2 .....	31
2.1.3.3 Alat dan Bahan Profil Analisis Jaminan Sosial 3 .....	31
2.1.4 Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Jaminan Sosial .....	32
2.1.5 Jadwal Pelaksanaan Program Profil Analisis Jaminan Sosial ....	33
2.2.1 Sistem Partisipan Program Profil Analisis Sumber dana Bantuan Sosial .....	50
2.2.2 Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	52
2.2.3 Alat dan Bahan Program Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	53
2.2.4 Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	54
2.2.5 Jadwal Pelaksanaan Program Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	55
2.3.1 Sistem Partisipan Program Profil Pemberdayaan Sosial .....	69
2.3.2 Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Pemberdayaan Sosial .....	70
2.3.3 Alat dan Bahan Program Profil Analisis Pemberdayaan Sosial .....	71
2.3.4 Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Pemberdayaan Sosial .....	73
2.3.5 Jadwal dan Langkah Pelaksanaan Program Profil Analisis Pemberdayaan Sosial .....	74
2.4.1 Sistem Partisipan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	88
2.4.2 Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	89
2.4.3 Alat dan Bahan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	90
2.4.4 Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	91

2.4.5	Jadwal Pelaksanaan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	93
2.5.1	Sistem Partisipan Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	108
2.5.2	Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	109
2.5.3	Alat dan Bahan Program Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	110
2.5.4	Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	111
2.5.5	Jadwal Pelaksanaan Program Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Pembekalan Profil Jaminan Sosial .....	6
1.2 Pembekalan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial .....	8
1.3 Pembekalan Profil Pemberdayaan Sosial .....	10
1.4 Pembekalan Profil Penataan Lingkungan Sosial .....	11
1.5 Pembekalan Profil Penanggulangan Bencana .....	13
2.1 Analisis Pohon Masalah Profil Jaminan Sosial .....	21
2.2 Analisis Pohon Masalah Profil Sumber Dana Bantuan Sosial .....	44
2.3 Analisis Pohon Masalah Profil Pemberdayaan Sosial .....	63
2.4 Analisis Pohon Masalah Profil Penataan Lingkungan Sosial	82
2.5 Analisis Pohon Masalah Profil Penanggulangan Bencana ...	102

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1.	Surat Undangan Lokakarya .....	120
2.	Berita Acara Pelaksanaan Ujian Lisan Praktikum Laboratorium .....	121
3.	Absensi Praktikan di Kelurahan Cicaheum .....	122
4.1.1	Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi .....	123
4.1.2	Rundown Pelaksanaan Program Pemasangan Wifi .....	123
4.1.3	Rundown Pelaksanaan Program Kunjungan Perusahaan .....	124
4.2	Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pelatihan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Sosial .....	124
4.3	Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi Peningkatan Kualitas TP PKK Kelurahan Cicaheum .....	125
4.4	Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keamanan Wilayah Kelurahan Cicaheum .....	126
4.5	Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi Peduli Lingkungan Sekitar .....	127
5.1	Dokumentasi Kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial .....	128
5.2	Dokumentasi Kegiatan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial ..	129
5.3	Dokumentasi Kegiatan Profil Pemberdayaan Sosial .....	130
5.4	Dokumentasi Kegiatan Profil Penataan Lingkungan Sosial ....	131
5.5	Dokumentasi Kegiatan Profil Penanggulangan Bencana .....	132
6.	Dokumentasi Kegiatan Supervisi dan Bimbingan .....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung merupakan lembaga pendidikan tinggi dibawah Kementrian Sosial Republik Indonesia. Poltekesos memiliki wadah Pendidikan tidak hanya melalui pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran melalui praktikum laboratorium atau praktik. Praktikum laboratorium ini menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam melakukan proses asesmen hingga proses rencana intervensi pekerjaan sosial. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktik laboratorium ini disamping melaksanakan aktivitas dalam ruangan, mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang ada di masyarakat, namun sehubungan pandemi covid ini belum berakhir sepenuhnya, maka kegiatan praktikum lapangan yang dilakukan perlu memerhatikan peraturan kesehatan yang ada, khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Profil lulusan yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mealakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

Praktikum laboratorium ini menggunakan data primer dan sekunder. Praktikum dimulai pada 8 Februari 2023 hingga 15 April 2023. Praktikan mencari isu sesuai dengan profil yang telah ditentukan, kemudian melakukan asesmen dengan memerhatikan permasalahan, kebutuhan dan potensi yang tersedia. Setelah asesmen, praktikan dapat merancang suatu intervensi untuk menindaklanjuti adanya permasalahan tersebut, Praktikan dapat menggunakan metode, teknik, dan teknologi yang sudah dipelajari untuk melakukan analisis. Pada kegiatan praktikum laboratorium, praktikan hanya melakukan analisis dan menyusun rencana intervensi. Pada profil Analisis Jaminan Sosial praktikan menggunakan isu “Belum terdaftarnya masyarakat sektor informal pada

kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kelurahan Cicaheum". Pada profil dua yaitu Sumber Dana Bantuan Sosial praktikan menggunakan isu "Belum sesuai mekanisme dan prosedur pemberian dana bantuan sosial di Kelurahan Cicaheum dengan Peraturan Pemerintah". Pada profil tiga yaitu Analisis Pemberdayaan Sosial praktikan menggunakan isu "Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kader TP PKK Kelurahan Cicaheum pada program-program yang dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum". Pada profil empat Analisis Penataan Lingkungan praktikan menggunakan isu "Masih dijumpai kasus pengedaran narkoba oleh pemuda di wilayah Kelurahan Cicaheum". Pada profil lima yang merupakan profil terakhir Analisis Penanggulangan Bencana praktikan menggunakan isu "Permasalahan limbah dari perusahaan PT NAGAMAS (tekstil) di sungai cipamokolan".

## **B. Tujuan dan manfaat praktikum**

Pelaksanaan kegiatan praktikum laboratorium ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan praktikan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran serta mampu mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.

### **1. Tujuan Praktikum**

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Buku Pedoman Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai berikut :

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan;
- b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial;
- c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial;
- d. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial;

- e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
  - 1) Pendekatan Awal;
  - 2) Asesmen;
  - 3) Perencanaan Intervensi.

## 2. Manfaat Praktikum

Selain berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas, kegiatan praktikum ini juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan praktikan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran serta mampu mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, maka manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
  - 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
  - 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
  - 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
  - 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
  - 6) Mahasiswa memiliki keterampilan dalam proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
    - a) Pendekatan awal;

- b) Asesmen;
  - c) Perencanaan Intervensi;
  - d) Intervensi;
  - e) Evaluasi, rujukan, dan terminasi.
- b. Bagi Lembaga
- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
  - 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

### C. Waktu dan lokasi praktikum

Kegiatan praktikum laboratorium memiliki fokus untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa yang disini sebagai praktikan agar mampu meningkatkan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial yang berfokus kepada 5 ( lima ) pembentukan profil lulusan perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana.

#### 1. Waktu Praktikum

Praktikum laboratorium program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung. Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikan selama tiga bulan selama 6 jam per hari dilaksanakan hari Rabu sampai hari Sabtu pada setiap minggunya selama satu semester (17 minggu), pelaksanaan praktikum laboratorium dilaksanakan sejak tanggal 8 Februari sampai 18 April 2023.

Berdasarkan ketentuan oleh lembaga Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang mengharuskan kegiatan praktikan berada di lokasi praktikum yang telah dibagi, pada semester VI Tahun Akademik 2022/2023 ini, jadwal praktikum laboratorium dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut ini :

- a. Pra Lapangan
  - 1) Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
  - 2) Pelepasan Praktikan : 3 Februari 2023
- b. Lapangan (Indoor) : 8 Februari – 15 April 2023
- c. Pasca Lapangan
  - 1) Bimbingan penulisan laporan : 16 – 26 April 2023
  - 2) Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
  - 3) Ujian Lisan Praktikum : 2 – 3 Mei 2023
  - 4) Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

## 2. Lokasi Praktikum

Pelaksanaan praktikum dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

### D. Proses praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

##### a. Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh nara sumber yang terdiri dari:

- 1) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
- 2) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

##### b. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:

- 1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom
- 2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan
- 3) Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
  - a) Mengenal populasi kelompok sasaran (population targetgroup) dan lingkungan sosialnya.
  - b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
  - c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
  - d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.

4) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

##### c. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum Serah terima praktikan, dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media *zoom* meeting dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

## 2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

### a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Membahas tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia, oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE selaku perencana ahli muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas, yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Februari 2023, meliputi:

- a) Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial
- b) Model jaminan sosial yang digunakan
- c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial
- d) Merancang program jaminan sosial
- e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial
- f) Stakeholder terkait program jaminan sosial.



Gambar 1.1 Pembekalan Profil Jaminan Sosial

2) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:

- a) Pengetahuan:
  - (1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
  - (2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial

- (3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
- (4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial

b) Keterampilan

- (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuansosial
- (4) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
- (5) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.

c) Praktik Analisis Jaminan Sosial, meliputi :

- (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial
- (2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
- (3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dipilih oleh praktikan
- (4) Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial

b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri Bapak Toton Heriyanto selaku CSE Manager PT. AAPC Indonesia. Membahas tentang peningkatan kompetensi analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari 2023, meliputi:
  - a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,
  - b) Model sumber dana bantuan sosial, yang digunakan
  - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
  - d) Merancang program sumber dana bantuan sosial,
  - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,
  - f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial



Gambar 1.2 Pembekalan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

- 2) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri Bapak Toton Heriyanto selaku CSE Manager PT. AAPC Indonesia. Membahas tentang peningkatan kompetensi analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari 2023, meliputi:
  - a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuansosial,
  - b) Model sumber dana bantuan sosial,yang digunakan
  - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
  - d) Merancang program sumber dana bantuan sosial,
  - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,
  - f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial
- 3) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
  - a) Pengetahuan
    - (1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya
    - (2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
    - (3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial
    - (4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
    - (5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakanpenggalangan sumber dana bantuan sosial
    - (6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial

- b) Keterampilan
  - (1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
  - (2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
  - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
  - (4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
  - (5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial
- c) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi:
  - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
  - (2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - (3) Menyusun Rencana Intervensi
  - (4) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial
- c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial
  - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi/industri oleh Bapak Samsul Maarif selaku Project Manager YUM Kab. Cianjur Membahas tentang peningkatan kompetensi analisis pemberdayaan sosial, pada Rabu, 8 Maret 2023 meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial,
    - b) Model pemberdayaan sosial, yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam lingkup Pemberdayaan Sosial,
    - d) Merancang program Pemberdayaan Sosial,
    - e) Melakukan analisis kelayakan terkait rancangan program Pemberdayaan Sosial
    - f) Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial



*Gambar 1.3 Pembekalan Profil Pemberdayaan Sosial*

- 2) Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:
  - a) Pengetahuan
    - (1) Menguasai berbagai konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
    - (2) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
    - (3) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
    - (4) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
    - (5) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
    - (6) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial
  - b) Keterampilan
    - (1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
    - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi pemberdayaan sosial
    - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
    - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
    - (5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
    - (6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
    - (7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan

- modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
- (8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
- (9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
- (10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial
- c) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial, meliputi :
  - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
  - (2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - (3) Menyusun Rencana Intervensi
  - (4) Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial

d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Bapak Ade Reno, AKS., MSW selaku Deputy 1 CEO Islamic Relief Indonesia Membahas tentang peningkatan kompetensi ahli Penataan Lingkungan Sosial, pada Jumat, 24 Maret 2023 yang meliputi:
  - a) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
  - b) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
  - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial
  - d) Merancang program penataan lingkungan sosial
  - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
  - f) Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial



Gambar 1.4 Pembekalan Profil Penataan Lingkungan Sosial

- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
  - a) Pengetahuan
    - (1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
    - (2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
    - (3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
    - (4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
    - (5) Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
    - (6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
    - (7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
  - b) Keterampilan
    - (1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
    - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
    - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
  - c) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :
    - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
    - (2) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
    - (3) Menyusun Rencana Intervensi
    - (4) Menyusun laporan praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial
  
- e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana
  - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana

- b) Model penanggulangan bencana yang digunakan
- c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
- d) Merancang program penanggulangan bencana
- e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
- f) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana



*Gambar 1.5 Pembekalan Profil Penanggulangan Bencana*

- 2) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

- a) Pengetahuan

- (1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
- (2) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
- (3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
- (4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
- (5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

- b) Keterampilan

- (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
- (3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
- (4) Mampu menganalisis dan menyusun berbagai program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
- (5) Mampu menganalisis dan menyusun berbagai program

pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana

- c) Praktik Analisis Penanggulangan Bencana, meliputi :
  - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
  - (2) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - (3) Menyusun Rencana Intervensi
  - (4) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana

### **3. Tahap Pasca Lapangan**

- a. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
- b. Ujian Lisan Praktikum
- c. Perbaikan dan penyerahan laporan

### **E. Sistematika laporan**

Sistematika laporan praktikum ini terdiri dari 3 bab, bab pertama adalah bab pendahuluan, bab kedua adalah bab praktikum laboratorium, serta bab 3 yang berisi kesimpulan dan rekomendasi, seperti sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum dan sistematika laporan
- BAB II : Praktikum laboratorium yang berisikan tentang gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori, asesmen, dan rencana intervensi dari lima profil lulusan yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana
- BAB III : Kesimpulan dan rekomendasi kepada program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial

## **BAB II**

### **PRAKTIKUM LABORATORIUM**

#### **A. Profil Analisis Jaminan Sosial**

##### **1. Gambaran Umum Masalah**

Salah satu parameter untuk menilai kemajuan suatu negara dapat dilihat dari wujud upaya pembangunan nasional yang dilakukan. Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya meningkatkan upaya pembangunan nasional dengan disesuaikan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari upaya pembangunan nasional difokuskan pada aspek tenaga kerja yang lebih kompleks seringkali banyak keterbatasan sosial ekonomi. Pembangunan ketenagakerjaan terus diperbaiki oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan bentuk perlindungan kerja melalui jaminan sosial. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 1 mengartikan bahwa jaminan sosial merupakan suatu bentuk atau wujud perlindungan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak

Terdapat sebuah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk pekerja non formal. Pekerja non formal masuk ke dalam kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerjaan yang termasuk ke dalam pekerjaan non formal yaitu seperti wirausaha, freelancer, pekerja lepas dan PKL.

Di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung tentunya begitu beragam profesi yang dimiliki oleh warga setempat. Namun, yang menjadi perhatian disini ialah mereka (warga setempat) yang dimana profesi tersebut termasuk ke dalam sektor informal. Faktanya masih terdapat masyarakat pekerja sektor informal yang masih belum terdaftar sebagai peserta dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Mengingat resiko sosial ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, termasuk para pekerja sektor informal. Risiko sosial

ekonomi itu diantaranya seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada suatu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep BPJS Ketenagakerjaan**

#### **1) Pengertian Jaminan Sosial**

Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan. Sementara itu menurut UU SJSN yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan penjelasan di atas, jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial. SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

#### **2) Pengertian BPJS Ketenagakerjaan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas untuk melindungi seluruh pekerja melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

#### **3) Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan**

- a) Visi BPJS Ketenagakerjaan Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.
- b) Misi BPJS Ketenagakerjaan Misi BPJS Ketenagakerjaan adalah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk (1) melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, (2)

meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, dan (3) mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

#### **4) Dasar Hukum BPJS Ketenagakerjaan**

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.
- h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

#### **5) Program-program BPJS Ketenagakerjaan**

- a) Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)  
Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) merupakan jaminan sosial yang berupaya memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) merupakan salah satu jaminan yang diwajibkan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

b) Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan Kematian (JKM) merupakan salah satu jaminan yang diwajibkan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

c) Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan jaminan sosial yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu jaminan yang disarankan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

d) Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan tahapan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

**6) Alur Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan**

Bagi Pekerja Migran Indonesia, Untuk melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, pekerja migran dapat melakukannya di dalam maupun luar negeri. Untuk pekerja migran yang sedang berada di luar negeri, dapat mendaftarkan dirinya secara online. Untuk pekerja migran atau calon pekerja migran di dalam negeri, alur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

- a) Calon pekerja migran atau pekerja migran mendaftar BPJS Ketenagakerjaan melalui lembaga pelaksana penempatan.
- b) Perekaman data-data calon pekerja migran atau pekerja migran di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- c) Setelah mendapatkan ID Billing atau kode bayar, calon pekerja migran atau pekerja migran dapat melakukan pembayaran iuran pertama.
- d) Setelah mendapatkan bukti pembayaran, calon pekerja migran atau pekerja migran dapat menyerahkan bukti pembayaran ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh bukti kepesertaan fisik maupun digital.

## **b. Konsep Usaha Sektor Informal**

### **1) Pengertian Pekerja Sektor Usaha Informal**

Dikutip dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Pasal 1 Disebutkan Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.

### **2) Sebab Munculnya Pekerja Sektor Usaha Informal**

Menurut Castells dan portes (1989) : (kutipan dari Priyoyo Agus) menyebutkan bahwasannya terdapat lima sebab munculnya sektor usaha informal, diantaranya:

- a) Sektor informal merupakan kegiatan ekonomi perseorangan atau individu yang muncul sebagai suatu kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan terorganisir.
- b) Sektor informal merupakan usaha ekonomi bebas dari kegiatan ekonomi pemerintah yang telah dikenai pajak ekonomi dan memiliki hukum jaminan yang jelas dalam usaha.
- c) Sektor usaha informal merupakan usaha lokal yang tidak mampu berkompetisi secara nasional sebagai reaksi adanya intervensi ekonomi skala internasional.
- d) Sektor informal merupakan unit usaha bayangan (shadow of production) sebagai reaksi modernisasi dan industrisasi, mereka adalah unit – unit kecil yang tidak terorganisir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha informal merupakan kumpulan pedagang dan penjual yang memiliki modal yang kecil, dan dari segi produksi tidak begitu menguntungkan meskipun dari hasil yang didapat menunjang kehidupan, contoh dari usaha informal adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling dan pedagang kecil lainnya.

### **3) Ciri – Ciri Pekerja Sektor Usaha Informal**

Adapun ciri-ciri sektor informal menurut Urip Soewarno dan Hidayat (1979: 38), adalah sebagai berikut:

- a) Aktivitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik karena timbulnya tidak melalui institusi yang ada pada perekonomian modern.
- b) Karena kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini, maka sektor informal tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah.
- c) Pada umumnya setiap unit usaha tidak memiliki izin usaha dari pemerintah.

- d) Pola kegiatan tidak teratur dengan baik dalam arti tempat dan jam kerja.
- e) Unit usaha pada sektor ini mudah untuk masuk dan keluar dari sektor ke sektor lain.
- f) Karena modal dan peralatan serta perputaran usaha relative kecil, maka skala operasi unit usaha ini kecil pula.
- g) Teknologi yang digunakan termasuk kedalam teknologi yang sederhana.
- h) Untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, serta keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman.
- i) Unit usaha ini termasuk ke dalam one man enter prise atau kalau memiliki buruh, maka buruh berasal dari lingkungan keluarga atau disebut juga family enterprise.
- j) Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber keuangan tidak resmi.
- k) Hasil produksi dan jasa dari sektor ini terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat miskin dan kadang-kadang oleh golongan menengah.

#### **4) Jenis Pekerja Sektor Usaha Informal**

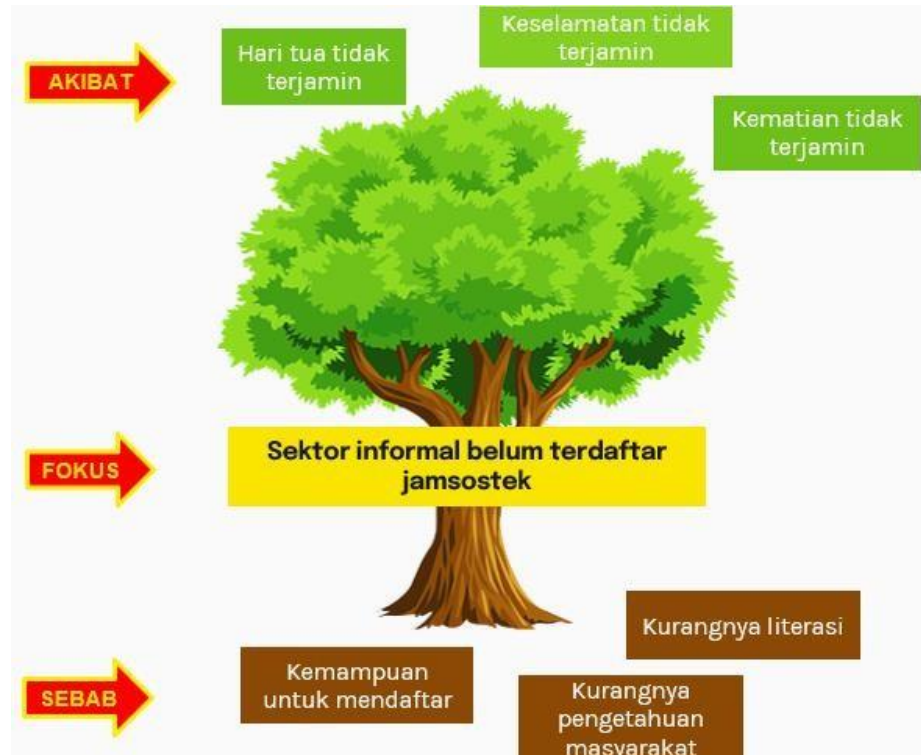
Usaha informal adalah jenis usaha kecil dengan modal yang kecil, usaha yang masuk kategori usaha informal diantaranya, yakni:

- a) Pedagang keliling: Pedagang keliling merupakan pedagang yang menjajakan barangnya dengan cara memperlihatkan atau menawarkan barang dagangannya kepada pembeli atau konsumen, pedagang asongan biasanya berkeliling di area halte, bus, lampu merah, dan stasiun kereta api, produk yang dijual oleh pedagang asongan biasanya relatif kecil dan banyak. contohnya: rokok, tisu, permen, dll
- b) Jasa Tukang Jahit/ tailor Tukang jahit : merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang konveksi dimana orang tersebut mendirikan sendiri jasa jahit tetapi dalam lingkup yang kecil.
- c) Jasa Tukang cuci Tukang cuci : orang yang menawarkan jasanya untuk mencuci bukan seperti laundry akan tetapi berupa penawaran jasa mencuci ke rumah – rumah.
- d) Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan grobak, meja atau tenda. Rata-rata pedagang kaki lima tidak memiliki keterampilan dan keahlian dalam manajemen usaha sebagai alternatif untuk mengembangkan usaha.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab masalah



Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Program Jaminan Sosial

Berdasarkan analisis pohon masalah tersebut, adapun berbagai penyebab permasalahan utama yakni sektor informal yang belum terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diantara penyebab permasalahan tersebut, yakni,

- a) Kurangnya Literasi. Dalam permasalahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, kita tidak bisa langsung menyalahkan pemerintah daerah setempat ataupun bahkan lembaga penyelenggara tersebut. Karena, ketidak ikutsertaan masyarakat (pekerja sektor informal) dalam program BPJS Ketenagakerjaan dapat terjadi akibat dari masyarakat itu sendiri yang kurang literasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan ini. Entah itu terhalang oleh tingkat pendidikan ataupun bahkan media informasi tersebut.
- b) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat. Akibat dari kurangnya literasi masyarakat terkait program BPJS Ketenagakerjaan ini, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat masih kurang memahami pentingnya ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini.

- c) Kemampuan untuk Mendaftar. Penyebab yang satu ini bisa menjadi salah satu alasan bagi mereka mengapa mereka tidak ikut kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan karena beberapa hal seperti, dokumen kependudukan yang tidak lengkap, alat bantu/media yang tidak memadai atau bahkan tidak dimilikinya, dan lain sebagainya.

## 2) Dampak Masalah

Dari penyebab yang ada maka akan timbul akibat yang akan terjadi dalam masyarakat terkait permasalahan kepesertaan sektor informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan, diantara akibat tersebut yakni,

- a) Keselamatan Kerja Tidak Terjamin. Apapun jenis pekerjaan masyarakat, pastinya akan selalu ada resiko kerja yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Termasuk sektor informal, tidak menutup kemungkinan pula dalam jenis pekerjaan ini terdapat resiko pekerjaan.
- b) Kematian Tidak Terjamin. Salah satu manfaat yang diberikan oleh lembaga penyelenggara kepada sektor informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kematian yang memberikan manfaat seperti, uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman.
- c) Hari Tua Tidak Terjamin. Seiring dengan berjalannya waktu, maka usia-pun akan bertambah dan produktivitas dalam bekerja pula akan semakin menurun. Karena tidak menutup kemungkinan apabila seorang pekerja dapat mengalami kecacatan total ataupun bahkan sampai meninggal dunia, sementara itu pekerjaannya dapat berhenti akibat hal tersebut.

## 3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan berdasarkan gejala masalah yang dikemukakan di atas, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah **“Pekerja Sektor Usaha Informal masyarakat Kelurahan Cicaheum yang masih belum terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.”**

### b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dan dipenuhi, diantaranya seperti berikut,

- 1) Penyediaan *wifi* di tempat umum. Masyarakat di Kelurahan Cicaheum ini, memiliki alat bantu/media elektronik yang berbeda.

Media elektronik yang dimiliki oleh masyarakat tersebut juga memiliki kondisi yang berbeda, seperti memiliki media elektronik yang masih dalam kondisi aman, *Handphone* jadul, gaktek (gagap teknologi), kerusakan internal atau eksternal, tidak memiliki *Handphone* tetapi memiliki Laptop/PC, dan lain sebagainya. Dengan menyediakan *wifi* umum bagi masyarakat daerah setempat, setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir kemampuan literasi masyarakat dalam mencari dan mengolah informasi yang ada terkait pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga masyarakat tersebut dapat mendapatkan informasi yang ada dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkannya.

- 2) Sosialisasi. Sosialisasi ini perlu diberikan kepada masyarakat Kelurahan Cicaheum, khususnya bagi mereka para pekerja sektor informal. Dalam sosialisasi ini, pihak penyelenggara dapat memberikan berbagai macam informasi penting terkait program BPJS Ketenagakerjaan termasuk mekanisme dan prosedur tata cara melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kualitas pengetahuan dan kemampuan keterampilan masyarakat dalam program tersebut dapat meningkatkan.
- 3) Ekonomi. Selain kemampuan pengetahuan, keterampilan dan alat bantu yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Cicaheum yang beragam, maka kondisi ekonomi yang dimilikinya juga beragam. Namun, hal tersebut tetap dapat menjadi salah satu alasan bagi mereka dalam terhambat/terkendalanya keikutsertaan masyarakat sektor informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga perlu dibantu.

### c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (1973:4) sistem sumber terbagi menjadi 3 yaitu,

- 1) Sistem sumber formal merupakan sistem yang keanggotaannya di dalam suatu organisasi dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Sistem sumber formal yaitu jajaran pemerintah di kelurahan Cicaheum. Hal tersebut karena jajaran pemerintah di Kelurahan Cicaheum berperan sebagai sistem sumber formal untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan diharapkan dapat membantu warga untuk menjalankan keberfungsian sosialnya.

- 2) Sistem sumber informal merupakan sistem sumber yang penggunaannya tidak menggunakan prosedur, sifatnya tanpa pamrih, ikhlas, jujur, penuh persahabatan dan cinta kasih. Sistem informal seperti keluarga, teman, tetangga, dan orang lain yang bersedia membantu dan memberikan dukungan emosional, kasih sayang, dan nasihat. Sistem sumber informal yaitu pengurus RT dan RW yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Pengurus RT dan RW di Kelurahan Cicaheum memiliki hubungan yang terikat secara kekeluargaan dan gotong royong terjalin tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Mereka saling hidup berdampingan untuk membantu satu sama lain.
- 3) Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan yaitu,
  - a) Dinas Sosial Kota Bandung yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
  - b) BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung, Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan dalam dunia pekerjaan. Terdapat sebuah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan terkait peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, khususnya masyarakat Kelurahan Cicaheum dapat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan selama mereka bekerja.
  - c) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, disamping itu juga terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, dan terjalinnya kerja sama dan sinergitas antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan
  - d) Perusahaan besar dan menengah, adanya perusahaan besar dan menengah di wilayah Kelurahan Cicaheum ini diharapkan dapat membantu masyarakat daerah sekitar. Sebuah perusahaan

tentunya memiliki yang namanya CSR. Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Adanya program CSR bisa membantu mereka dalam meningkatkan kualitas SDM. Bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

#### 4. Rencana Intervensi

##### a. Latar Belakang

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 500.580 orang (42,22 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 685.043 orang (57,78 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 naik sebesar 0,48 persen poin jika dari keadaan Agustus 2020.

Melihat data tersebut maka perluasan pekerja sektor informal atau dalam hal ini peserta bukan penerima upah masih kecil sekali dan perlu ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena baik pekerja formal dan informal semuanya berhak mendapatkan perhatian dalam hal jaminan sosial. Keterlibatan pemerintah maupun kelompok masyarakat dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja.

*"pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kembali keberadaan sektor informal sebagai salah satu sektor usaha penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Bagaimanapun juga keberadaan pekerja sektor informal menopang kehidupan para pekerja yang belum mampu menyentuh sektor formal. Untuk itu, maka cakupan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal menjadi sangat penting, khususnya pada sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan resiko pekerjaan yang rentan, seperti pedagang kaki lima, ojek, pedagang asongan dan sebagainya." (Pitoyo, 2007).*

Kondisi wilayah merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan dengan memiliki zona yang padat dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Dengan luas wilayah 167,67 km<sup>2</sup> dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis, Kelurahan Cicaheum memiliki 12 RW dengan 77 RT yang masing-masing memiliki berbagai karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda. Jumlah penduduk Kelurahan Cicaheum mencapai 17.418 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.838 Jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 8.580 jiwa. Mata pencaharian pokok yang menjadi mayoritas penduduk Kelurahan Cicaheum adalah sebagai pedagang dan pegawai baik swasta atau negeri. Disamping itu banyak pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh dan juga petani, sehingga secara garis besar banyak penduduk yang bekerja pada sektor informal. Faktanya, mayoritas pekerja sektor informal ini, ternyata belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar iuran yang ada, belum mengetahui pentingnya keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

**b. Tujuan umum dan khusus**

**1) Tujuan Umum**

Dapat meningkatkan kesadaran diri masyarakat Kelurahan Cicaheum terkait pentingnya terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tumbuh rasa solidaritas diantara mereka dalam mensejahterakan para pekerja, khususnya mereka yang termasuk dalam golongan sektor usaha informal.

**2) Tujuan Khusus**

- a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sektor informal terkait pentingnya terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- b) Membantu Kelurahan dalam pengelolaan anggaran yang ada untuk penyediaan koneksi internet di tempat umum sebagai salah satu bentuk fasilitas umum yang iurannya dibayarkan oleh masyarakat sekitar
- c) Menghimbau kepada para perusahaan besar dan menengah untuk dapat membantu para pekerja informal dalam membiayai iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

**c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Program yang akan dilaksanakan yakni “**Sejalin Informal: Sejahterakan dan Lindungi Sektor Usaha Informal Masyarakat Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.**”

**d. Sistem Partisipan**

Tabel 2.1.1 Tabel Sistem Partisipan Profil Analisis Jaminan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2	<i>Agent of Change System</i>	Pekerja sosial
3	<i>Client System</i>	1. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 2. Masyarakat Kelurahan Cicaheum 3. TKSK
4	<i>Support System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung 3. Kelurahan Cicaheum 4. RT dan RW Di Kelurahan Cicaheum
5	<i>Supervision System</i>	Dinas Sosial Kota Bandung
6	<i>Executor System</i>	1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung 2. Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung 3. TKSK Kiaracandong 4. Pekerja Sosial
7	<i>Target System</i>	1. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 2. Masyarakat Kelurahan Cicaheum 3. Perusahaan Besar dan Menengah wilayah Kelurahan Cicaheum
8	<i>Action System</i>	Pekerja Sosial

**e. Metode dan Teknik**

Metode yang digunakan adalah *Community Organization* atau pengorganisasian masyarakat yang mana proses ini digunakan untuk mengembangkan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali berbagai permasalahan yang berada di masyarakat dengan melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah

yang lebih baik. Pada kegiatan sosialisasi ini, praktikan menggunakan model *locality development* yang memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat. Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

- 1) Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- 2) *Fokus Group Discussion* (FGD) merupakan teknik berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secaramendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu.
- 3) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan**

**1) Rencana Anggaran Biaya**

**a) Sosialisasi**

*Tabel 2.1.2.1 Tabel Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Jaminan Sosial*

NO	JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	SATUAN HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
<b>1</b>	<b>LOGISTIK</b>				
	<b>Pendataan</b> 1) ATK	1	Paket	200.000	200.000
	<b>Penyuluhan</b> 1) <i>Banner</i> 2) <i>Doorprize</i>	2 10	Lembar Paket	90.000 20.000	180.000 200.000
	<b>Pemantauan</b> -	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>				580.000
	<b>2</b>	<b>TRANSPORTASI</b>			
<b>Pendataan</b> 1) Petugas		4	Orang	100.000	400.000
<b>Penyuluhan</b> -		-	-	-	-
<b>Pemantauan</b> 1) Petugas		4	Orang	100.000	400.000
<b>JUMLAH</b>					800.000

<b>KONSUMSI</b>					
<b>3</b>	<b>Pendataan</b>				
	1) Petugas	4	Orang	10.000	40.000
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	2) Panitia	5	Orang	10.000	50.000
	3) Tamu undangan	5	Orang	10.000	50.000
	4) Peserta	40	Orang	10.000	400.000
	<b>Pemantauan</b>				
1) Petugas	4	Orang	10.000	40.000	
<b>JUMLAH</b>					600.000
<b>HONORARIUM</b>					
<b>4</b>	<b>Pendataan</b>				
	-				
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	500.000	1.000.000
	<b>Pemantauan</b>				
-					
<b>JUMLAH</b>					1.000.000
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b>2.980.000</b>

#### b) Penyediaan Wifi Umum

Tabel 2.1.2.2 Tabel Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Jaminan Sosial

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>VOL</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN (RP)</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
<b>1</b>	Jasa Pemasangan	4	Orang	250.000	1.000.000
<b>2</b>	Iuran	12	Provider	200.000	2.400.000
<b>JUMLAH</b>					<b>3.400.000</b>

#### c) Kunjungan Perusahaan

Tabel 2.1.2.3 Tabel Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Jaminan Sosial

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>VOL</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN (RP)</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
<b>1</b>	Transportasi	40	Liter	15.000	600.000
<b>JUMLAH</b>					<b>600.000</b>

## 2) Alat yang Dibutuhkan

### a) Sosialisasi

Tabel 2.1.3.1 Tabel Alat dan Bahan Profil Analisis Jaminan Sosial

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Pendataan	ATK
2	Penyuluhan	ATK <i>Banner</i> Lokasi penyelenggaraan Kursi Meja Alat dokumentasi <i>Soundsystem</i> <i>Microphone</i> <i>Proyektor</i> Layar <i>Doorprize</i>
3	Pemantauan	ATK

### b) Pemasangan Wifi

Tabel 2.1.3.2 Tabel Alat dan Bahan Profil Analisis Jaminan Sosial

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Kunjungan	Transportasi

### c) Kunjungan Perusahaan

Tabel 2.1.3.3 Tabel Alat dan Bahan Profil Analisis Jaminan Sosial

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Kunjungan	Transportasi

## g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam program, atau mengevaluasi. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan program atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Tujuan dari analisis ini untuk menilai dan menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan, dan dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, risiko, potensial, dan strategi dalam pelaksanaan program.

Tabel 2.1.4 Tabel Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Jaminan Sosial

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>(S) Strength</b></p> <p>1. Dinas Sosial Kota Bandung</p> <p>2. BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung</p> <p>3. TKSK Kecamatan Kiaracandong</p> <p>4. Dukungan Pemerintah Desa, RW dan RT</p>	<p><b>(W) Weakness</b></p> <p>1. Belum terciptanya koordinasi yang baik antara TKSK dengan pihak desa sebagai sasaran pendataan</p> <p>2. Kurangnya pembaharuan DTKS terkait sektor informal yang belum terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan</p>
<p><b>(O) Oportunity</b></p> <p>1. Antusias luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terkait pentingnya keikutsertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>2. Dukungan dari perusahaan besar dan menengah dalam bentuk bantuan iuran dari sebagian anggaran perusahaan yang ada</p> <p>3. Dukungan dari masyarakat Kelurahan Cicaheum</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>1. Menjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Kelurahan Cicaheum, TKSK Kiaracandong, berbagai perusahaan terkait dan masyarakat sekitar</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>1. Meningkatkan sosialisasi yang dilakukan kepada perusahaan terkait dan masyarakat pekerja sektor informal</p>
<p><b>(T) Threat</b></p> <p>1. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pendataan DTKS dan</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1. Melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1. Meningkatkan keaktifan dan produktivitas TKSK dalam pelaksanaan</p>

penyesuaian antara data dengan kondisi lapangan di Kelurahan Cicaheum 2. Penggunaan wifi umum memiliki resiko penggunanya terkena virus atau gangguan lainnya akibat ulah peretas 3. Bekerja sama dengan perusahaan yang belum terverifikasi terdapat resiko yang mungkin akan dialami dalam bidang hukum; kemanaan; reputasi dan; kualitas	mengenai pentingnya pembaharuan DTKS <b>2.</b> Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data kependudukan yang didapat <b>3.</b> Melakukan persiapan yang matang dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan perusahaan	tugas pokok dan fungsinya
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

#### h. Jadwal dan Langkah-langkah

##### 1) Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program mengenai Sejalin Informal (Sejahterakan dan Lindungi Sektor Usaha Informal) di Kelurahan Cicaheum ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu dengan mengadakan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FDG), pemasangan layanan internet di tempat umum, kunjungan perusahaan untuk berdiskusi dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi program. Jadwal pada program disusun berdasarkan kebutuhan dan sasaran kegiatan.

Tabel 2.1.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Program Profil Analisis Jaminan Sosial

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	PJ	Jadwal Kerja	Anggaran
1	Sosialisasi edukasi pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat sektor informal	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Masyarakat sektor informal	Dinsos Kota Bandung, BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung, Pemerintah daerah setempat dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

2	<i>Focus Group Discussion</i>	Mengetahui permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat	Masyarakat sektor informal	Dinsos Kota Bandung, BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung, Pemerintah daerah setempat dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
3	Penyediaan Wifi umum di seluruh wilayah Kelurahan Cicaheum	Masyarakat dapat mencari dan mengolah informasi sebanyak-banyaknya melalui internet	Masyarakat Kelurahan Cicaheum	Pemerintah Kelurahan Cicaheum serta petugas pelayanan dan pemasangan wifi umum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
4	Kunjungan kepada perusahaan besar dan menengah	Berdiskusi dan bekerja sama dalam membantu memberikan sebagian anggarannya kepada masyarakat sektor informal dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan besar dan menengah di wilayah Kelurahan Cicaheum	Dinsos Kota Bandung, Pemerintah Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
5	Monitoring dan Evaluasi Program	Memastikan jalannya program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan untuk mengetahui berbagai kendala ataupun permasalahan yang dialami selama program dilaksanakan	Dinsos Kota Bandung, Pemerintah Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	Dinsos Kota Bandung, Pemerintah Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

## 2) Langkah-Langkah Kegiatan

### a) Sosialisasi

#### (1) Pra Pelaksanaan

- (a) Identifikasi peserta kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Cicaheum yaitu masyarakat sektor informal sebagai sasaran utama
- (b) Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung
- (c) Penyiapan materi yang akan digunakan untuk melaksanakan sosialisasi pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- (d) Penetapan narasumber dalam kegiatan sosialisasi pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial Kota Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan
- (e) Penyiapan lokasi kegiatan Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di Aula Kelurahan Cicaheum

#### (2) Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan satu hari dalam dua sesi.

- (a) Sesi pertama membahas mengenai pengetahuan dan kebijakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
- (b) Sesi kedua membahas mengenai mekanisme dan permasalahan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

#### (3) Pasca Pelaksanaan

- (a) Monitoring kepada masyarakat sektor informal
- (b) Menyusun laporan

### b) Pemasangan Wifi

#### (1) Pra pelaksanaan

- (a) Memetakan pemasangan wifi di seluruh wilayah Kelurahan Cicaheum dengan memberikan 1 *provider* untuk 1 RW
- (b) Mempersiapkan berbagai persyaratan pemasangan wifi yang dibutuhkan
- (c) Mendatangi kantor pelayanan provider internet yang akan dituju
- (d) Menentukan paket pembayaran yang akan dibayarkan setiap bulannya dan mengisi formulir pendaftaran
- (e) Memberikan iuran pertama dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ada

**(2) Pelaksanaan**

- (a) Pemasangan *wifi* di seluruh wilayah Kelurahan Cicaheum sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah disepakati
- (b) Memastikan *wifi* tersebut dapat digunakan dengan layak

**(3) Pasca pelaksanaan**

- (a) Monitoring dan evaluasi penggunaan *wifi* umum pada masyarakat Kelurahan Cicaheum
- (b) Melakukan penarikan iuran kepada warga untuk membayar penggunaan *wifi* tersebut setiap bulannya

**c) Kunjungan Perusahaan**

**(1) Pra pelaksanaan**

- (a) Menyusun topik pembahasan yang akan disampaikan
- (b) Membuat list perusahaan yang akan dituju
- (c) Menghubungi jadwal pertemuan melalui media platform (apabila ada kontak yang dapat dihubungi)
- (d) Membuat kesepakatan jadwal pertemuan

**(2) Pelaksanaan**

- (a) Mendatangi perusahaan – perusahaan yang ada, baik yang sudah dijadwalkan maupun tidak
- (b) Menyampaikan tujuan pertemuan diskusi terkait dengan pemanfaatan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yakni, memberikan sebagian anggaran perusahaan untuk dapat membantu iuran kepesertaan masyarakat pekerja sektor usaha informal pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

**(3) Pasca pelaksanaan**

- (a) Melakukan monitoring dan evaluasi program untuk menentukan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan
- (b) Menyusun laporan

**i. Indikator Keberhasilan**

- 1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pekerja sektor informal terkait pentingnya ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- 2) Mampu mengelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan baik untuk pelayanan fasilitas umum, khususnya penyediaan koneksi internet di seluruh wilayah Kelurahan Cicaheum

- 3) Menghimbau kepada para perusahaan besar dan menengah untuk dapat membantu para pekerja informal dalam membiayai iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR

## **B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial**

### **1. Gambaran Umum Masalah**

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya. Beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan sosial sebagaimana disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, diketahui terdapat warga di Jakarta, mereka mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan dan di Padang terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan (Ratna Sari Dewi, 2020). Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. Beliau mengatakan bahwa setiap Kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Pemerintah seharusnya memperbaiki kualifikasi data penerima bansos, jangan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah. Jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah dari penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat adalah data penerima bantuan. Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus

diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri. Setelah itu Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan ke Menteri.

Permasalahan penyaluran bantuan sosial ternyata bukan hanya masalah data. Dari ulasan berita yang disampaikan (Khadafi, 2020), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/5/2020) mengatakan terdapat tiga masalah dalam penyaluran bantuan sosial yaitu: (1) masalah alokasi anggaran ditiap Kementrian berbeda. Pada Kementrian sosial tidak ada masalah anggaran namun terdapat masalah alokasi anggaran di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Berdasarkan data terakhir, penyaluran dana desa udah diterima oleh 53.156 desa atau 70,9 persen, sisanya, 21.797 belum menerima dana. Kemudian dari 53.156 desa, dana desa yang telah disalurkan sebagai BLT kepada keluarga penerima manfaat, sebanyak 12.829 desa atau sekitar 17 persen. (2) Masalah data, dibutuhkan pendataan yang hati hati agar tidak salah sasaran sehingga penyaluran menjadi agak lambat. (3) Masalah sistem penyaluran, selama ini data yang sudah dihimpun RT/RW harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diturunkan menjadi data penerima bantuan sosial. Hal itu telah diperbaiki dengan meniadakan proses verifikasi untuk percepatan penyaluran.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep Bantuan Sosial**

#### **1) Pengertian Bantuan Sosial**

Bantuan sosial (bansos) merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan

sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang. Ketentuan mengenai bantuan sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut undang-undang tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Secara umum bantuan sosial dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial,

- a) Bantuan sosial berupa uang, Diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial jenis ini dapat diberikan secara tunai maupun non tunai kepada sasaran kelompok masyarakat.
- b) Bantuan sosial berupa barang, Barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- c) Bantuan sosial berupa jasa, Disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh bantuan berupa jasa adalah pemberian pelatihan untuk penerima bantuan dari satuan kerja (pemberi bantuan sosial).

## 2) **Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial**

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan “komplit”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Untuk pemberian hibah, selain berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012, maka pemberian hibah yang bersumber pada APBD, juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Demikian pula untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam penganggarannya juga diatur setiap tahunnya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

### 3) Sumber Dana Bantuan Sosial

#### a) Sumber Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah

Anggaran bantuan sosial terdapat dua sumber, yang pertama adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam menangani dampak pandemi *Covid-19*, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, penyiapan bantalan sosial, dan dukungan stimulus bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani dampak pandemi *Covid-19* dengan sangat baik. Oleh karena itu, di dalam menetapkan target pendapatan negara yang mencapai Rp2.463 triliun ini sedikit lebih naik dari yang diusulkan awal. Keberhasilan penanganan dampak pandemi *Covid-19* menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44% pada Q2 tahun 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merealisasi anggaran tematik dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Januari 2023 untuk perlindungan sosial (perlinsos) telah mencapai Rp14,6 triliun. Realisasi anggaran tematik perlinsos pada Januari 2023 tersebut tumbuh 6,2 persen dari capaian Januari 2022 yang senilai Rp13,7 triliun. Selain pemanfaatan belanja K/L berupa bansos melalui Kementerian Sosial (Kemensos), anggaran juga telah digunakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk penyaluran KIP Kuliah. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta kpm, Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN, Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa. Sementara, anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan sebesar Rp311,8 triliun antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi

listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.

**b) Sumber Dana Bantuan Sosial dari Masyarakat**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang PUB (Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang). Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang PUB bermaksud agar pengumpulan uang atau barang dapat dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel serta dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang. Apalagi pada waktu bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan seperti sekarang ini, perlu semua usaha menghimpun dan mengerahkan segala *funds and forces* bagi pembangunan semesta ini diatur dan diawasi sebaik- baiknya.

**b. Konsep Prosedur**

**1) Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departmen di dalam perusahaan. Menurut Mulyadi (2008: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Sedangkan menurut Azhar (2000: 195) juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara

berulang dengan cara yang sama. Dari kedua definisi prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari penulisan, pemberian kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar.

## 2) **Karakteristik Prosedur**

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari prosedur, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
- b) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e) Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
- f) Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi.
- g) Mencegah terjadinya penyimpangan.
- h) Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

## 3) **Manfaat Prosedur**

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
- b) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
- c) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- d) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- e) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

### **c. Konsep Peraturan Perundang-Undangan**

#### **1) Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **2) Fungsi Peraturan Perundang-Undangan**

a) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan:

- (1) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
- (2) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
- (3) pengaturan di bidang: hubungan antar lembaga Negara dan; hubungan antar warga Negara/penduduk.

b) Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:

- (1) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
- (2) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

c) Peraturan Presiden menyelenggarakan:

- (1) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
- (2) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
- (3) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

d) Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan:

- (1) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (2) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### 3) Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah



Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan pohon masalah tersebut di dapatkan beberapa penyebab yang timbul dari munculnya permasalahan utama yang diangkat, beberapa penyebab tersebut diantaranya,

- a) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum update. DTKS menjadi faktor utama dan terpenting dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, karenanya DTKS harus selalu di-update dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Meskipun, dalam pendataannya terdapat berbagai kendala yang dialami oleh pihak terkait, seperti tingkat kelahiran dan kematian yang berubah setiap harinya, data kependudukan yang tidak lengkap, dan lain sebagainya.
- b) Penerima di non-aktifkan. Menyambung dari DTKS, terkadang dalam pemberian bantuan sosial di suatu daerah, masih terdapat berbagai kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan data yang ada. Salah satunya yakni, status penerima bantuan sosial telah di non-aktifkan, namun masih menerima bantuan.
- c) NIK invalid. Data kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya memiliki kondisi yang berbeda, seperti NIK yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kehilangan KTP, rusaknya akta kelahiran, dan berbagai kendala lainnya. Hal tersebut dapat menjadi suatu hambatan dalam pendataan masyarakat.
- d) Permasalahan status masyarakat di DTKS. Akibat dari DTKS yang tidak update, maka tidak menutup kemungkinan apabila status yang dimiliki oleh masyarakat di DTKS tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemberian bantuan sosial terhadap suatu masyarakat.

## **2) Dampak Masalah**

Dari penyebab yang ada maka akan timbul akibat yang akan terjadi dalam masyarakat terkait prosedur pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat, seperti

- a) Bantuan tidak tepat sasaran. Apabila DTKS tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, maka dapat dipastikan bahwa pemberian bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Berbagai permasalahan yang sering terjadi seperti, status penerima bantuan namun tidak mendapatkan bantuan, status bukan penerima namun mendapatkan bantuan, keluarga memiliki tingkat ekonomi yang cukup/tergolong

tinggi namun masih menerima bantuan, sebaliknya dan lain sebagainya.

- b) Bantuan tidak sesuai kebutuhan. Faktanya permasalahan seperti ini masih sering terjadi, yakni pemberian bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik itu bersifat individu maupun kelompok. Hal ini tentunya masih berkaitan dengan DTKS yang tidak update, sehingga pendataan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
- c) Maladministrasi. Apabila dalam pemberian bantuan sosial terdapat permasalahan seperti bantuan tidak tepat sasaran dan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hal tersebut dapat dikatakan maladministrasi dalam program pemberian bantuan sosial. Selain itu, terdapat juga potensi permasalahan maladministrasi lainnya yaitu terlambatnya masyarakat mendapatkan bansos. Tentu hal tersebut juga masuk ke dalam kategori penundaan berlarut-larut yang merupakan perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi baku mutu waktu dari janji layanan. Kemudian yang lebih parah lagi, ditemukan juga persoalan lain, seperti adanya potongan dana bansos yang dilakukan oleh oknum aparat kewilayahan setempat, dengan dalih pengganti ongkos.

### 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan berdasarkan gejala masalah yang dikemukakan di atas, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah **“Belum sesuai prosedur pemberian dana bantuan sosial di Kelurahan Cicaheum dengan Peraturan Pemerintah.”**

## b. Identifikasi Kebutuhan

- 1) Diperlukan pemberian informasi dan wawasan kepada aparat pemerintah daerah setempat, khususnya pihak pengelola bantuan sosial di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung terkait mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas kesadaran diri dan pemahaman pihak pengelola terkait mekanisme dan alur prosedur pelayanan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
- 2) Diperlukan pemberian pelatihan kepada aparat pemerintah daerah setempat, khususnya pihak pengelola bantuan sosial di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung terkait mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial. Peningkatan kualitas pemahaman individual perlu dibarengi dengan praktiknya, yakni

adanya pelatihan. Hal tersebut dilakukan agar pihak pengelola mengetahui secara keseluruhan terkait mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, bukan hanya menguasai teorinya saja.

### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sumber merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan keberfungsian sosial. Menurut Alan Pincus dan Minahan sistem sumber terbagi menjadi 3 yaitu,

- 1) Sistem sumber formal adalah sistem yang keanggotaannya di dalam suatu organisasi dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Sistem sumber formal yaitu jajaran pemerintah di kelurahan Cicaheum. Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna yang mana merupakan lembaga formal yang memiliki peranan dalam membantu dan menggerakkan kegiatan iuran iuran wajib.
- 2) Sistem sumber informal merupakan sistem sumber yang penggunaannya tidak menggunakan prosedur, sifatnya tanpa pamrih, ikhlas, jujur, penuh persahabatan dan cinta kasih. Sistem informal seperti keluarga, teman, tetangga, dan orang lain yang bersedia membantu dan memberikan dukungan emosional, kasih sayang, dan nasihat. Sistem sumber informal yaitu pengurus RT dan RW yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Pengurus RT dan RW di Kelurahan Cicaheum memiliki hubungan yang terikat secara kekeluargaan dan gotong royong terjalin tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Mereka saling hidup berdampingan untuk membantu satu sama lain.
- 3) Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan yaitu Dinas Sosial Kota Bandung

## **4. Rencana Intervensi**

### **a. Latar Belakang**

Menurut J.G Jabbra (Haryatmoko, 2013:107) akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik, mengandung tiga unsur yaitu (1) tanggung jawab (2) akuntabilitas (3) liabilitas. Akuntabilitas adalah hal yang mutlak dalam mewujudkan *Good Governance*, di mana pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya. Sebagai

organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang “menarik” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR atau Wakil Rakyat melihatnya sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan perhatian mereka terhadap rakyat yang sudah memilihnya. Sedangkan masyarakat/kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja yang menyedot perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah terkait. Sebagai pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial, pada tahun 2015 Pemerintah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam era digitalisasi, pemerintah telah membuat peraturan untuk mendorong keterbukaan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah serta dapat meminimalisir kebocoran yang akan terjadi. Hal ini, dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial dibandingkan penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara tunai. Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara digital merupakan suatu ukuran yang menentukan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

**b. Tujuan umum dan khusus**

**1) Tujuan Umum**

Dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pihak pengelola bantuan sosial di Kelurahan Cicaheum sehingga pemberian bantuan sosial tersebut dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada

**2) Tujuan Khusus**

- a) Meningkatkan kesadaran pihak pengelola untuk memerhatikan mekanisme dan prosedur pemberian dana bantuan sosial yang baik dan benar
- b) Meningkatkan kerjasama yang baik diantara para anggota pihak pengelola bantuan sosial
- c) Melakukan pelatihan kepada para pihak pengelola tentang prosedur pelayanan pemberian dana bantuan sosial

**c. Bentuk kegiatan dan Program**

Program yang akan dilaksanakan adalah **“Sosialisasi dan pelatihan tentang mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah di Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.”**

**d. Sistem Partisipan**

*Tabel 2.2.1 Tabel Partisipan Program Profil Sumber Dana Bantuan Sosial*

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2	<i>Agent of Change System</i>	Pekerja sosial
3	<i>Client System</i>	1. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 2. TKSK
4	<i>Support System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Kelurahan Cicaheum 3. RT dan RW Di Kelurahan Cicaheum
5	<i>Supervision System</i>	Dinas Sosial Kota Bandung
6	<i>Executor System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 3. TKSK Kiaracandong 4. Pekerja Sosial
7	<i>Target System</i>	1. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum

		2. Masyarakat Kelurahan Cicaheum 3. Perusahaan Besar dan Menengah wilayah Kelurahan Cicaheum
8	<i>Action System</i>	Pekerja Sosial

**e. Metode dan Teknik**

Metode yang digunakan dalam kegiatan peningkatan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh Pemerintah di Kelurahan Cicaheum adalah metode *Community Organization Community Development* (COCD). Pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam rangka menolong individu, kelompok dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri, mengembangkan tanggungjawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau merevitalisasi institusi lokal dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Cicaheum.

Teknik yang digunakan yaitu dengan teknik edukasi dan teknik kolaborasi. Teknik edukasi berarti suatu proses memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam usaha meningkatkan kapasitas diri dengan melakukan pelatihan, pengajaran, proses dan cara mendidik. Dalam pengembangan sosial masyarakat, salah satu taktik yang digunakan adalah kolaborasi (Netting,1993:250) menjelaskan bahwa teknik kolaborasi menunjukkan adanya hubungan antara kedua sistem yaitu sistem sasaran dengan sistem pelaksana perubahan yang mana kedua sistem tersebut saling menyetujui dilakukannya perubahan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2.2.2 Tabel Rencana Anggaran Biaya Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	SATUAN HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
<b>LOGISTIK</b>					
1	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Banner	1	Lembar	90.000	90.000
	2) Doorprize	10	Paket	20.000	200.000
	<b>Pemantauan</b>				
	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					290.000
<b>TRANSPORTASI</b>					
2	<b>Pendataan</b>				
	-	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	-	-	-	-	-
<b>Pemantauan</b>					
-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>					-
<b>KONSUMSI</b>					
3	<b>Pendataan</b>				
	-	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	2) Panitia	5	Orang	10.000	50.000
	3) Tamu undangan	5	Orang	10.000	50.000
	4) Peserta	20	Orang	10.000	200.000
<b>Pemantauan</b>					
-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>					320.000
<b>HONORARIUM</b>					
4	<b>Pendataan</b>				
	-	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	500.000	1.000.000
<b>Pemantauan</b>					
-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>					1.000.000
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b>1.610.000</b>

## 2) Alat yang Dibutuhkan

Tabel 2.2.3 Tabel Alat dan Bahan Program Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Pendataan	-
2	Penyuluhan	ATK <i>Banner</i> Lokasi penyelenggaraan Kursi Meja Alat dokumentasi <i>Soundsystem</i> <i>Microphone</i> <i>Proyektor</i> Layar <i>Doorprize</i>
3	Pemantauan	-

### g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam program, atau mengevaluasi. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan program atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Tujuan dari analisis ini untuk menilai dan menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan, dan dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, risiko, potensial, dan strategi dalam pelaksanaan program.

Tabel 2.2.4 Tabel Analisis Kelayakan Program Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

<p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>(S) Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para staff kelurahan yang memiliki keterampilan pengelolaan yang baik</li> <li>2. Jumlah staff kelurahan yang memadai sehingga memiliki kuantitas yang baik</li> <li>3. Staff kelurahan yang memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas</li> </ol>	<p><b>(W) Weakness</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas tempat kerja yang belum memadai sehingga masih perlu dikembangkan</li> <li>2. Kesibukan yang padat sehingga kesulitan dalam menentukan masalah prioritas yang terjadi di masyarakat</li> </ol>
<p><b>(O) Oportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kemauan pihak pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan Cicaheum dalam hal perubahan</li> <li>2. Dukungan yang diberikan dari pemerintah pusat dan masyarakat untuk mendorongnya suatu perubahan yang baik</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat perubahan dan perbaikan pengelolaan pelayanan publik dengan memanfaatkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh staff kelurahan</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan dukungan yang diberikan pemerintah dalam peningkatkn fasilitas tempat kerja yang layak</li> <li>2. Mengatur dengan baik pelayanan publik yang diberikan dengan menentukan prioritas masalah</li> </ol>
<p><b>(T) Threat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas kependudukan yang tidak lengkap dapat menghambat pendataan DTKS</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kebiasaan keterampilan kerja yang baik sehingga dapat diteruskan</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik sehingga dapat dikatakan profesional dalam</li> </ol>

2. Kemungkinan munculnya permasalahan yang sama di masa mendatang	oleh generasi berikutnya 2. Meningkatkan semangat kerja yang dimiliki oleh staff kelurahan	bekerja melayani masyarakat
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

## h. Jadwal dan Langkah-langkah

### 1) Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program mengenai pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Cicaheum dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu dengan mengadakan sosialisasi peningkatan pemahaman pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja, *Focus Group Discussion* (FDG), dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi program. Jadwal pada program disusun berdasarkan kebutuhan dan sasaran kegiatan

Tabel 2.2.5 Jadwal Pelaksanaan Program Profil Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	PJ	Jadwal Kerja	Anggaran
1	Sosialisasi peningkatan pemahaman staff kelurahan terkait prosedur pemberian bantuan sosial	Mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman staff kelurahan tentang mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah	Staff Kelurahan Cicaheum	Dinsos Kota Bandung, Pengurus Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
2	Pelatihan keterampilan kerja staff Kelurahan Cicaheum	Dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan kerja dalam prosedur pelayanan pemberian bantuan sosial	Staff Kelurahan Cicaheum	Dinsos Kota Bandung, Pengurus Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

3	<i>Focus Group Discussion</i>	Mengetahui berbagai macam kendala yang dialami oleh pihak Kelurahan Cicaheum dalam mengelola pemberian bantuan sosial	Staff Kelurahan Cicaheum	Dinsos Kota Bandung, Pengurus Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
4	Monitoring dan Evaluasi	Mengetahui berbagai macam faktor penghambat dan menentukan solusi permasalahan	Staff Kelurahan Cicaheum	Dinsos Kota Bandung, Pengurus Kelurahan Cicaheum dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

## 2) Langkah-Langkah Kegiatan

### a) Pra Pelaksanaan

- (1) Identifikasi peserta kegiatan Sosialisasi Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Di Kelurahan Cicaheum yaitu staff Kelurahan Cicaheum
- (2) Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu Pemerintahan Kelurahan Cicaheum, Dinas Sosial Kota Bandung, dan TKSK
- (3) Penyiapan materi yang akan digunakan untuk melaksanakan Sosialisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemberian bantuan sosial sesuai dengan pedoman resmi pemerintah Di Kelurahan Cicaheum yaitu tercantum dalam PERMENDAGRI no. 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (4) Penetapan narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bantuan Sosial Di Kelurahan Cicaheum yakni Kepala Kelurahan Cicaheum dan Dinas Sosial Kota Bandung

(5) Penyiapan lokasi kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bantuan Sosial Di Kelurahan Cicaheum

**b) Pelaksanaan**

Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan tentang mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah di Kelurahan Cicaheum dilakukan satu hari dalam dua sesi.

(1) Sesi pertama membahas mengenai pentingnya memahami tentang mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah

(2) Sesi kedua melakukan kegiatan pelatihan dalam melatih keterampilan yang dimiliki oleh pihak Kelurahan dalam mengelola bantuan sosial

**c) Pasca Pelaksanaan**

(1) Melakukan monitoring dan evaluasi program pada Pemerintahan Kelurahan Cicaheum

(2) Menyusun laporan

**i. Indikator Keberhasilan**

1) Meningkatnya kesadaran pihak Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum dalam memerhatikan mekanisme dan prosedur pemberian dana bantuan sosial yang baik dan benar sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah

2) Terbangunnya kerjasama yang baik diantara para pihak terkait dalam pengelolaan program bantuan sosial

3) Meningkatnya pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh pihak pengelola tentang prosedur pelayanan pemberian dana bantuan sosial

**C. Profil Pemberdayaan Sosial**

**1. Gambaran Umum Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kependudukan, dimana saat ini jumlah penduduk Indonesia menempati urutan terbesar keempat di dunia. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan, dimana kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting terhadap keberhasilan program itu sendiri, pada hakekatnya pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila sumber daya manusia mampu berpartisipasi secara optimal. Perkembangan zaman yang semakin maju ditandai dengan adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi diberbagai bidang kehidupan membawa dampak positif bagi kehidupan. Perkembangan itu

membawa dampak yang signifikan dalam menunjang keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu dengan adanya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK.

Konsep pemberdayaan (*empowering*) dalam pendidikan luar sekolah di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Kindervatter (1979: 13) memandang bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Anwar, 2007: 77). Kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam perspektif gender telah disadari oleh pemerintah sejak tahun 1980-an, kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program khusus diperuntukkan bagi perempuan untuk mengejar ketinggalannya, pengintegrasian peranan, kepentingan dan aspirasi perempuan dalam program umum. Kebijaksanaan umum tentang peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan yaitu: perlu memperhatikan keanekaragaman perempuan Indonesia serta kebutuhan kepentingan dan aspirasinya. Program peningkatan peranan perempuan perlu menjangkau semua kelompok perempuan, tetapi perhatian utama akan ditujukan kepada perempuan golongan ekonomi lemah dipedesaan, daerah rawan sosial ekonomi di perkotaan (Anwar, 2007: 92). Peranan kelompok PKK mempunyai arti tersendiri dikalangan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahklak mulia dan berbudi luhur sehat sejahtera, maju dan mandiri sehingga bisa tercukupinya sandang pangan papan kesehatan sehingga terwujudnya tingkat ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya melalui peran PKK ini.

Tim penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. TP PKK ini terdiri dari beberapa yakni pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa/kelurahan. Hubungan kerja antara TP PKK pusat dengan TP PKK di daerah (TP PKK provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan), adalah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarkis. Ada 10 program pokok PKK hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Untuk

melaksanakan 10 program pokok PKK perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi dilakukan oleh 4 (empat) kelompok kerja secara luwes dan koordinatif yaitu pokja I, pokja II, pokja III, pokja IV. Sumber pembiayaan gerakan PKK akan didasarkan kepada swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Peranan bantuan pemerintah dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Bantuan pemerintah dalam keadaan dan kondisi tertentu merupakan faktor pendorong untuk menumbuhkan kreatifitas dan aktivitas masyarakat dengan swadaya dan gotong royong. Pemerintah gencar menyelenggarakan dan terus menerus manambah sasaran program yang bisa meningkatkan mutu serta kualitas sehingga kualitas SDM bisa meningkat dan mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri sehingga taraf ekonomi yang tadinya hanya rendah berangsur angsur meningkat ke taraf ekonomi yang tinggi. Mengingat keterbatasan baik faktor ekonomi, kondisi sosial, ekonomi masyarakat, kualitas pendidikan, motivasi dan lain-lain maka harus disiapkan sesuatu program khusus yang dapat menjawab keterbatasan-keterbatasan tersebut. Seiring melaksanakan pembangunan nasional diperlukan juga pengetahuan dan peningkatan SDM manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berhasil dan berdaya guna. Kelompok PKK di Kelurahan Cicaheum Kota Bandung ini merupakan salah satu dari program PKK yang diadakan di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Tujuan diadakan program PKK tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi sandang, pangan, papan, kesehatan dan membiasakan merencanakan segala sesuatu dalam semua aspek kehidupannya dan perancangan ekonomi keluarga serta mampu memanfaatkan SDM dengan baik.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep Pemberdayaan Sosial**

#### **1) Pengertian Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan erat kaitanya dengan pembangunan, dimana pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kehidupan

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial).konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable* (Chamber, 1995).

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implisit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

## 2) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah :

- a) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”;
- b) Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “ halhal yang mendasar dalam undangundang ini adalah mendorong untuk

memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”;

- c) Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah;
- d) Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik.”

### 3) Prinsip Pemberdayaan

Prinsip Pemberdayaan Sosial Menurut Najjati (2005:54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu :

#### a) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran

#### b) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

#### c) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

d) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang bahkan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

**4) Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya : Pertama, Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah; Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun local; Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya; Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia; Kelima, Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya, Keenam, pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom-up*. Ketujuh, keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

**b. Konsep Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

**1) Pengertian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan. PKK sebagai gerakan pembinaan masyarakat dimulai dari seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957 dan disusun mata mata pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 1961 serta menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga yaitu *Family relation* (Hubungan inter dan

antara keluarga), *Child Care* (Membimbing dan mengasuh anak), *Food* (makanan), *Clothing* (Makanan), *Housing* (Perumahan), *Health* (Kesehatan), *Family Income* (Keuangan Keluarga), *Home Management* (Tatalaksana Rumah Tangga), *Security* (Keamanan Lahir dan Batin), *Sound Planing* (Perencanaan Sehat).

Kelembagan dan pengelolaan gerakan PKK disebut Tim penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. TP PKK ini meliputi pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa/kelurahan. Hubungan kerja antara TP PKK pusat dengan TP PKK provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis serta mendekatkan jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) upaya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan dengan kemampuan memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat serta dapat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

## **2) Tujuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender kesadaran hukum dan lingkungan.

## **3) Sasaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

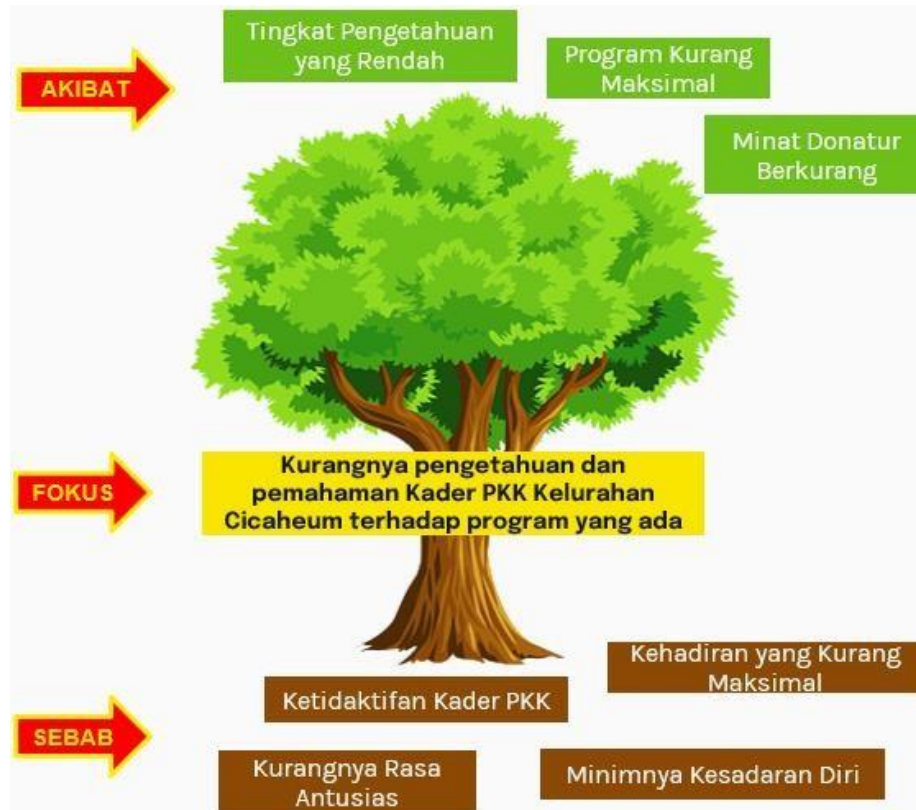
Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik dipedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiannya dalam bidang:

- a) Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan kesempatan kerja yang layak serta hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan pengetahuan dan keterampilan.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab masalah



Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Profil Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan pohon masalah tersebut di dapatkan beberapa penyebab yang timbul dari munculnya permasalahan utama yang diangkat, beberapa penyebab permasalahan tersebut diantaranya,

- a) Ketidaktifan Kader TP PKK. Hal mendasar yang menentukan jalannya keberlangsungan sebuah program adalah kehadiran pihak yang mengadakan sebuah program atau pihak yang memiliki peran penting dalam sebuah program kemasyarakatan di suatu daerah, salah satunya yakni Kader TP PKK. Tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas PKK di suatu daerah.
- b) Kehadiran yang kurang maksimal. Selain tidak aktifnya Kader PKK di suatu daerah, kehadiran yang kurang maksimal juga dapat menjadi salah satu permasalahan. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap jalannya program, pengetahuan dan pemahaman Kader TP PKK

terhadap berbagai program kemasyarakatan, dan kualitas yang dimiliki oleh Kader TP PKK di suatu daerah.

- c) Minimnya kesadaran diri. Tentu, kita juga perlu untuk saling mengerti terhadap antara anggota PKK yang memiliki jadwal kesibukan yang berbeda. Namun, apabila sudah menjadi bagian dari PKK, maka dari masing-masing individu perlu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pengetahuan dan pemahaman terkait program kemasyarakatan serta sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota PKK.
- d) Kurangnya rasa antusias. Kurangnya rasa antusias dapat timbul akibat berbagai hal yang dihadapi dan dirasakan oleh masing-masing anggota PKK ataupun bahkan mereka memiliki alasan yang sama. Seperti misalnya, Lingkungan PKK yang tidak sehat, program yang dilaksanakan cenderung monoton dan membosankan, tidak adanya imbalan, dan lain sebagainya.

## 2) Dampak Masalah

Dari penyebab yang ada maka akan timbul akibat yang akan terjadi dalam masyarakat terkait kurangnya pengetahuan dan pemahaman Kader PKK terhadap berbagai program kemasyarakatan yang ada. Adapun akibat yang ditimbulkan diantaranya seperti,

- a) Program menjadi kurang maksimal. Akibat yang ditimbulkan dari ketidakaktifan kader TP PKK dan kehadiran yang kurang maksimal yakni, program-program kemasyarakatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung tersebut menjadi kurang maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena kader PKK merupakan salah satu peran penting dalam program kemasyarakatan di suatu daerah.
- b) Tingkat pengetahuan yang rendah. Kehadiran kader TP PKK yang kurang maksimal dalam sebuah program kemasyarakatan yang ada juga akan mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman dalam individu kader TP PKK tersebut, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya sebuah program dan hal tersebut tentunya akan menunjukkan kualitas TP PKK di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.
- c) Minat donatur berkurang. Dalam sebuah program, tentunya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya anggaran. Anggaran menjadi salah satu faktor utama dalam menjalankan sebuah program. Para donatur ini akan melihat jalannya sebuah program dalam jangka waktu tertentu. Apabila dalam sebuah program dianggap tidak berjalan dengan apa yang seharusnya

ataupun bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, maka dapat dipastikan untuk program berikutnya, minat para donatur untuk memberikan anggarannya akan berkurang, lebih buruk lagi tidak memberi sama sekali.

**3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama**

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan berdasarkan gejala masalah yang dikemukakan di atas, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah **“Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman TP PKK Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung terhadap Berbagai Macam Program Kemasyarakatan yang ada.”**

**b. Identifikasi Kebutuhan**

- 1) Perbaiki struktur organisasi. Untuk dapat meningkatkan kualitas sebuah kelompok/organisasi yang baik, maka diperlukan pembentukan struktur organisasi yang matang berdasarkan hasil diskusi bersama. Hal tersebut menjadi penting, karena akan sangat berpengaruh dalam jalannya sebuah organisasi kedepannya. Apabila dalam sebuah organisasi tersebut diisi dan dikelola oleh orang-orang yang berpengetahuan, berpengalaman, aktif, dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya, maka organisasi tersebut memiliki kualitas yang baik.
- 2) Perbaiki kebijakan organisasi. Sebuah organisasi yang baik, tentunya memiliki pedoman yang baik pula dalam menjalankan tugasnya. PKK Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung ini perlu memerhatikan hal-hal penting dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, selalu melakukan diskusi bersama dalam setiap pengambilan keputusan, melakukan evaluasi pasca program, melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada, dan lain sebagainya.
- 3) Diperlukan adanya program internal. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan sebuah program. Dengan mengadakan program internal secara rutin, seperti kerja bakti, arisan dan rekreasi, tentunya hal tersebut akan membangun hubungan yang baik diantara kader PKK yang ada, dalam komunikasi, kepercayaan, serta pendirian yang teguh sehingga, hal tersebut akan berpengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi.
- 4) Diperlukan sosialisasi kepada para kader PKK Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung. Sosialisasi ini perlu diberikan kepada Kader PKK Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung terkait pentingnya menjalankan amanah dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di wilayah Kelurahan tersebut. PKK

memiliki peran yang penting di suatu daerah bagi wilayah itu sendiri ataupun bahkan akan berpengaruh pula nantinya pada tingkat Kecamatan misalnya.

### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sumber merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan keberfungsian sosial. Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan sistem sumber terbagi menjadi 3 yaitu,

- 1) Sistem sumber formal adalah sistem yang keanggotaannya di dalam suatu organisasi dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Sistem sumber formal yaitu jajaran pemerintah di Kelurahan Cicaheum. Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna.
- 2) Sistem sumber informal merupakan sistem sumber yang penggunaannya tidak menggunakan prosedur, sifatnya tanpa pamrih, ikhlas, jujur, penuh persahabatan dan cinta kasih. Sistem informal seperti keluarga, teman, tetangga, dan orang lain yang bersedia membantu dan memberikan dukungan emosional, kasih sayang, dan nasihat. Sistem sumber informal yaitu pengurus RT dan RW yang terdapat di Kelurahan Cicaheum. Pengurus RT dan RW di Kelurahan Cicaheum memiliki hubungan yang terikat secara kekeluargaan dan gotong royong terjalin tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Mereka saling hidup berdampingan untuk membantu satu sama lain.
- 3) Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan yaitu Dinas Sosial Kota Bandung dan UMKM yang tersebar di Kelurahan Cicaheum.

## **4.**

### **Rencana Intervensi**

#### **a. Latar Belakang**

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan pemerintah. Dalam bidang organisasi pemerintah telah melegalkan beberapa organisasi kemasyarakatan yang dikhususkan bagi wanita salah satunya adalah PKK. Menurut Arisandi (2015:1887) menyatakan bahwa “PKK merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi para wanita agar dapat mengembangkan dirinya didalam masyarakat”. Melalui pendapat ini disimpulkan bahwa PKK merupakan organisasi yang khusus dibentuk untuk memberdayakan wanita agar dapat mengembangkan diri

didalam lingkungan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK melalui program pokok PKK, salah satu program pokok PKK adalah pendidikan dan keterampilan. Program Pendidikan dan Keterampilan dalam organisasi PKK menurut Jovani (2016:154) menyatakan bahwa “PKK melaksanakan program keaksaraan fungsional, pelatihan yang dilakukan untuk membuat kerajinan tangan, produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual untuk meningkatkan penghasilan pendapatan keluarga”. Pada program pendidikan dan keterampilan dalam lingkungan masyarakat, wanita diajak untuk melakukan berbagai kegiatan kerajinan tangan melalui pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Nasution dalam Riana dkk, (2014:853) menyatakan bahwa *“keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik”*. Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan merupakan kesanggupan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh PKK tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi.

Menurut Suryadi dan Somardi dalam Setiawan (2016:64), *“keterampilan kewarganegaraan (civic skills) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara”*.

Masalah – masalah yang dimaksudkan disini adalah masalah yang ada didalam lingkungan masyarakat yang dialami oleh wanita seperti masalah kemiskinan, kesenjangan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan yang dilakukan PKK sebagai mitra kerja pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perempuan. Namun, sebelum menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat sebaiknya terlebih dahulu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan internal dari TP PKK. Karenanya, untuk dapat menciptakan kualitas pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya perbaikan hubungan dan kinerja dari internal TP PKK tersebut.

## **b. Tujuan umum dan khusus**

### **1) Tujuan Umum**

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kader PKK Kelurahan Cicaheum terhadap berbagai macam program yang dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.

## 2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan rasa solidaritas diantara anggota Kader PKK Kelurahan Cicaheum.
- b) Meningkatkan rasa antusias Kader PKK Kelurahan Cicaheum terhadap program-program yang dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum.
- c) Menghidupkan keaktifan Kader PKK Kelurahan Cicaheum sebagai organisasi kemasyarakatan.

## c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilaksanakan adalah “**Sosialisasi program kemasyarakatan dan peningkatan kualitas TP PKK Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.**”

## d. Sistem Partisipan

Tabel 2.3.1 Tabel Sistem Partisipan Program Profil Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2	<i>Agent of Change System</i>	Pekerja sosial
3	<i>Client System</i>	TP PKK Kelurahan Cicaheum
4	<i>Support System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Pemerintah Kecamatan Kiaracondong 3. Pemerintah Kelurahan Cicaheum 4. Karang Taruna 5. RT dan RW Di Kelurahan Cicaheum
5	<i>Supervision System</i>	1. Pemerintah Kecamatan Kiaracondong 2. Pemerintah Kelurahan Cicaheum
6	<i>Executor System</i>	1. Pemerintah Kecamatan Kiaracondong 2. Pemerintah Kelurahan Cicaheum
7	<i>Target System</i>	1. Pemerintah Kelurahan Cicaheum 2. TP PKK Kelurahan Cicaheum 3. Masyarakat Kelurahan Cicaheum
8	<i>Action System</i>	1. Pekerja Sosial 2. Pemerintah Kelurahan Cicaheum

#### e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan dalam kegiatan peningkatakan kualitas TP PKK di Kelurahan Cicaheum adalah metode *Community Organization Community Development* (COCD). Pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam rangka menolong individu, kelompok dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri, mengembangkan tanggungjawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau merevitalisasi institusi lokal dalam hal ini adalah pengurus PKK Kelurahan Cicaheum. Teknik yang digunakan yaitu dengan teknik edukasi dan teknik kolaborasi. Teknik edukasi berarti suatu proses memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam usaha meningkatkan kapasitas diri dengan melakukan pelatihan, pengajaran ,proses dan cara mendidik. Dalam pengembangan sosial masyarakat, salah satu taktik yang digunakan adalah kolaborasi (Netting,1993:250) menjelaskan bahwa teknik kolaborasi menunjukkan adanya hubungan antara kedua sistem yaitu sistem sasaran dengan sistem pelaksana perubahan,yang mana kedua sistem tersebut saling menyetujui dilakukannya perubahan.

#### f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

##### 1) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2.3.2 Tabel Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

NO	JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	SATUAN HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
<b>LOGISTIK</b>					
<b>1</b>	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) <i>Banner</i>	1	Lembar	90.000	90.000
	2) <i>Doorprize</i>	20	Paket	20.000	400.000
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					490.000
<b>KONSUMSI</b>					

2	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	2) Tamu undangan	6	Orang	10.000	60.000
	3) Peserta	60	Orang	10.000	600.000
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					680.000
<b>HONORARIUM</b>					
4	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	500.000	1.000.000
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>				
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b>2.170.000</b>

## 2) Alat yang Dibutuhkan

Tabel 2.3.3 Tabel Alat dan Bahan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Pendataan	-
2	Penyuluhan	ATK Banner Lokasi penyelenggaraan Kursi Meja Alat dokumentasi Soundsystem Microphone Proyektor Layar Doorprize
3	Pemantauan	-

## g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam program, atau mengevaluasi. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan program atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor

eksternal. Tujuan dari analisis ini untuk menilai dan menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan, dan dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, risiko, potensial, dan strategi dalam pelaksanaan program.

Tabel 2.3.4 Tabel Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>(S) Strength</b></p> <p>1. Struktur organisasi yang jelas dimiliki oleh TP PKK di tiap RW Kelurahan Cicaheum</p> <p>2. Sebagian kader TP PKK memiliki semangat dan kemauan yang tinggi dalam bekerja</p> <p>3. Adanya karang taruna yang selalu membantu dalam kegiatan TP PKK</p>	<p><b>(W) Weakness</b></p> <p>1. Terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam beberapa program TP PKK</p> <p>2. Masih terdapat kader PKK yang kurang aktif dalam berbagai program yang dilaksanakan</p>
<p><b>(O) Oportunity</b></p> <p>1. Adanya dukungan program dari pihak Kecamatan Kiaracondong</p> <p>2. Mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader TP PKK yang ada dalam menjalankan program kemasyarakatan</p> <p>3. Adanya peluang untuk meningkatkan dan mengelola anggaran yang baik</p> <p>4. Memaksimalkan produktivitas kader TP PKK yang ada dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader TP PKK yang ada dalam program sosialisasi</p> <p>2. Melakukan pelatihan keterampilan dalam mengelola organisasi kemasyarakatan yang baik</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>1. Mengelola anggaran yang ada dengan baik dan benar</p> <p>2. Memaksimalkan produktivitas yang dimiliki oleh kader TP PKK dalam melayani masyarakat</p>

<p><b>(T) Threat</b></p> <p>1. Kondisi Kader TP PKK yang kurang memadai</p> <p>2. Semangat kerja yang dimiliki dapat berubah pada waktu tertentu</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1. Memperbaiki hubungan internal yang ada di internal TP PKK</p> <p>2. Membuat program secara rutin dan teragenda sehingga telah memiliki tanggung jawab</p> <p>3. Melaksanakan berbagai macam program rekreasi untuk meningkatkan hubungan yang baik</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas dari kader TP PKK yang ada</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## h. Jadwal dan Langkah-langkah

### 1) Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program mengenai pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Cicaheum dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu dengan mengadakan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FDG), dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi program. Jadwal pada program disusun berdasarkan kebutuhan dan sasaran kegiatan

Tabel 2.3.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	PJ	Jadwal Kerja	Anggaran
1	Sosialisasi edukasi program masyarakat dan peningkatan kualitas TP PKK	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman TP PKK terhadap program masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan	TPP PKK di Kelurahan Cicaheum	Pemerintah Kelurahan Cicaheum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
2	<i>Focus Group Discussion</i>	Mengetahui permasalahan dan kendala	TPP PKK di	Pemerintah Kelurahan Cicaheum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

		yang dialami oleh TP PKK dalam melaksanakan atau mengikuti sebuah program kemasyarakatan	Kelurahan Cicaheum			
3	Monitoring dan evaluasi	Mampu mengetahui perubahan dan kendala yang dialami dalam melaksanakan program	TPP PKK di Kelurahan Cicaheum	Pemerintah Kelurahan Cicaheum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

## 2) Langkah-Langkah Kegiatan

### a) Pra Pelaksanaan

- (1) Identifikasi peserta kegiatan sosialisasi mengenai pembaharuan DTKS di Kelurahan Cicaheum yaitu Seluruh TP PKK di wilayah Kelurahan Cicaheum Kota Bandung sebagai sasaran utama
- (2) Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu Dinas Sosial Kota Bandung
- (3) Penyiapan materi yang akan digunakan untuk melaksanakan sosialisasi edukasi program kemasyarakatan dan peningkatan keterampilan TP PKK dalam melayani masyarakat ataupun mengikuti program lainnya
- (4) Penetapan narasumber dalam kegiatan sosialisasi edukasi program kemasyarakatan Pemerintah Kelurahan Cicaheum dan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong
- (5) Penyiapan lokasi kegiatan Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di Aula Kelurahan Cicaheum

### b) Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman program kemasyarakatan dilakukan satu hari dalam dua sesi.

- (1) Sesi pertama membahas mengenai pengetahuan dan pemahaman program kemasyarakatan yang diadakan
- (2) Sesi kedua membahas mengenai cara mengelola suatu organisasi kemasyarakatan yang baik dan sehat

### c) Pasca Pelaksanaan

- (1) Monitoring dalam seluruh rangkaian kegiatan
- (2) Menyusun laporan

**i. Indikator Keberhasilan**

- 1) Rasa solidaritas yang dimiliki antar anggota Kader TP PKK Kelurahan Cicaheum dapat meningkat
- 2) Antusias Kader TP PKK Kelurahan Cicaheum terhadap berpartisipasi dalam program-program yang dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum dapat terjaga
- 3) Keaktifan Kader TP PKK Kelurahan Cicaheum dapat meningkat dan stabil terjaga

**D. Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial**

**1. Gambaran Umum Masalah**

Kondisi Indonesia saat ini telah genting dengan isu darurat narkoba, salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan Indonesia terus mengalami peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Teknologi yang terus berkembang secara pesat dalam berbagai macam bidang tanpa disadari juga memberikan kontribusi dampak negatif terhadap perkembangan serta pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia, karena dengan akses kemudahan teknologi terutama di bidang informasi, peredaran gelap Napza dapat terjadi dengan lebih cepat dan mudah sehingga usaha dan upaya pencegahan masuknya zat zat narkotika terlarang yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum (Telaumbanua, 2018). Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkotika telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis dengan harga paling mahal yang hanya dapat dibeli dan didapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah. (Priambada, 2014). Kasus narkoba hingga saat ini masih menjadi problematika yang memprihatinkan bagi Indonesia. Kasus peredaran sabu serta marak terjadinya penangkapan terhadap bandar-bandar narkotika internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba (Hariyanto, 2018). Menurut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2019 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,6 juta, yang mana ada peningkatan kurang lebih sebesar 24 hingga 28 persen pada penggunaan narkotika yang pelakunya adalah remaja. (Puslidatin, 2019).

## 2. Tinjauan Konsep

### a. Konsep Penataan Lingkungan Sosial

#### 1) Pengertian Penataan Lingkungan Sosial

Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang. Penataan itu dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam menggalang kerja sama dan pergaulan sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran-peran yang harus dilakukan, dan mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang dapat diharapkan dari pihak lainnya.

##### a) Penataan Lingkungan Sosial Internal

Keakraban dan kedekatan orang tua dengan anak menyebabkan mereka mampu berkomunikasi secara efektif. Kemampuan orang tua dalam melakukan komunikasi efektif ini, juga karena mereka mampu membaca dunia anaknya (selera, keinginan, hasrat, pikiran dan kebutuhan). Penataan lingkungan sosial internal juga dapat dilakukan dengan menciptakan suasana rumah yang kondusif. Untuk mencapai situasi dan suasana rumah yang tenang, damai dan menyenangkan diperlukan adanya sikap yang dijalankan aturan komunikasi yang wajar di antara sesama anggota keluarga di dalamnya. Toleransi dan saling pengertian di antara sesama anggota keluarga akan memupuk kerja sama yang baik di antara anggota keluarga. Lingkungan internal dalam keluarga sangat menentukan sejatinya pribadi anak yang mencerminkan hasil didikan orang tuanya dan pola asuh dalam keluarga. Antar keluarga sering berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan anak, mengajrkan mulai dari hal yang sederhana sampai mengajarkan nilai-nilai agama.

##### b) Penataan Lingkungan Sosial Eksternal

Penataan lingkungan sosial eksternal dapat dilakukan orang tua dengan mengupayakan anak-anak untuk mengaji dan belajar ilmu agama di mesjid. Di sisi lain, penataan lingkungan sosial eksternal juga dapat dilakukan orang tua dalam hal memilihkan lingkungan sosial yang baik untuk anak, memilihkan teman-teman belajar, dan lain-lain.

#### 2) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah lingkungan yang di dalamnya menggambarkan suasana sosial maupun suasana fisik, dimana manusia hidup dan bertumbuh kembang didalamnya. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang menjadi tempat berlangsungnya beraneka ragam interaksi sosial yang terjalin antara berbagai

kelompok- kelompok sosial dalam masyarakat beserta pranata dan simbol sosial, dan juga nilai serta norma yang sudah terstruktur, serta berkaitan erat dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat sehari- hari. Menurut (Purba, 2002 : 13-14) Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang). Sedangkan, menurut pendapat ahli Stroz, lingkungan sosial adalah semua kondisi di sekitar dalam kehidupan dimana terdapat cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pertumbuhan dan perkembangan pada proses kehidupan, serta dapat pula dipandang sebagai bekal persiapan lingkungan bagi generasi yang selanjutnya atau generasi penerus.

### 3) **Jenis Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu:

#### a) Lingkungan sosial primer

Lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan yang terjalin erat antara anggota satu dengan anggota lain, dimana terjalin suatu hubungan saling kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain. Hubungannya saling berkesinambungan. Selain itu lingkungan sosial jenis ini ditandai dengan interaksi dan kerja sama yang bersifat fundamental, serta pertemuan yang intens dalam membentuk struktur dasar dan ide- ide sosial oleh individu secara mendalam.

#### b) Lingkungan sosial sekunder

Lingkungan sosial jenis ini di dalamnya terjalin suatu hubungan anggota satu dengan anggota lainnya secara agak longgar, tidak begitu intens, serta hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal maupun aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial sekunder didasarkan pada kepentingan atau aktivitas sosial tertentu yang khusus, dan para anggota dalam kelompok ini cenderung berinteraksi atas contoh status sosial yang spesifik, bukan untuk kepentingan umum.

#### 4) Faktor yang Memengaruhi Lingkungan Sosial

Faktor- faktor yang mempengaruhi lingkungan sosial adalah sebagai berikut:

a) Pengelompokan sosial

Pengelompokan sosial mencakup berbagai macam individu yang terkonstruksikan menjadi sekelompok individu dalam suatu persekutuan atau pengelompokan sosial yang dilandasi hubungan kekerabatan (*genealogical based relationship*), misalnya keluarga inti atau batih, marga atau klen, suku bangsa dan lain-lain.

b) Penataan sosial

Penataan sosial merupakan aspek penting yang mendukung dalam lingkungan sosial. Penataan sosial berfungsi sebagai pengatur ketertiban hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang dapat mempersatukan sekumpulan individu. Penataan sosial dapat terwujud dalam aturan-aturan yang dijadikan pedoman bersama dalam mewujudkan kerja sama dan interaksi sosial sehari-hari antar anggota masyarakat di lingkungan sosial terkait. Dalam hal ini, setiap orang harus jelas kedudukannya dan peranan- peranan yang harus dilakukan, serta memahami apa yang harus diberikan, kemudian apa yang dapat diharapkan dari pihak lainnya dalam suatu lingkungan sosial.

c) Pranata sosial

Pranata sosial pada umumnya dikembangkan berdasarkan pada aspek kepentingan penguasaan lingkungan permukiman yang memiliki makna penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang berkaitan di suatu lingkungan. Berbagai peraturan secara jelas dan terarah dikembangkan untuk menyaring secara selektif orang-orang yang bukan anggota dari fungsi pranata sosial sebagai kesatuan sosial.

d) Kebutuhan sosial

Lingkungan sosial itu secara dasar terkonstruksikan oleh dorongan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tidak semua kebutuhan hidup manusia itu bisa terpenuhi oleh seorang diri, adanya kebutuhan sosial (*social needs*) dimana dapat terpenuhi jika masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dapat saling berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari- hari.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

## **b. Konsep Narkotika**

### **1) Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.

Peristilahan yang banyak digunakan untuk menyebut narkoba adalah Napza, Naza dan Madat. Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter. Untuk terapi bagi para pecandu narkoba itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a) Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b) Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

### **2) Jenis – Jenis Narkotika**

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

- a) Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat

tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- (1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
  - (2) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
  - (3) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.
- b) Psikotropika sedangkan pengertian Psikotropika (Soerdjono Dirjosisworo : 1986) adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :
- (1) Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
  - (2) Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
  - (3) Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
  - (4) Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid ) dan diazepam.
- c) Zat adiktif lainnya Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :
- (1) Rokok
  - (2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

(3) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

### 3) **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwasannya para pelaku Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium);

- a) ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu;
- b) tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen;
- c) bukan merupakan residivis kasus narkotika; dan
- d) saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu Upaya untuk menyelamatkan atau memulihkan para pecandu agar terbebas dari narkoba dan bahaya yang menyertainya sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Proses rehabilitasi Narkoba tidaklah sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.

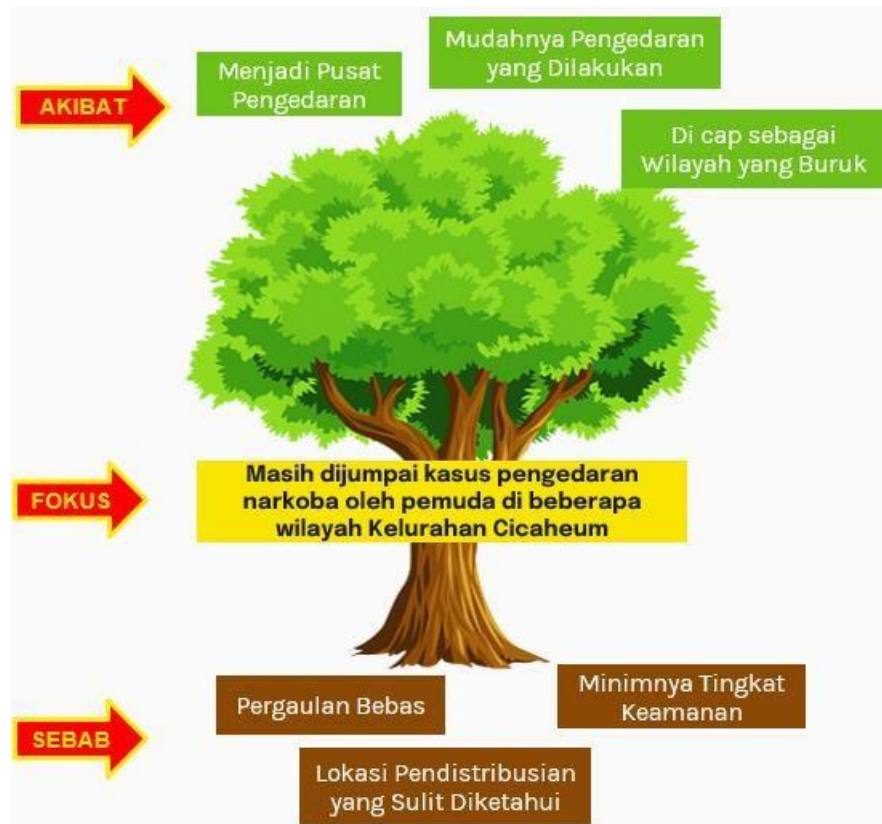
Tingkat kecanduan para pengguna narkoba juga dapat dikenali gejalanya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian.

Jika Pecandu narkoba adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa abstinen atau berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkotika di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika artinya masyarakat maupun para pecandu tidak perlu takut lagi untuk melaporkan diri, karena pecandu narkoba hanya akan diproses untuk menjalani rehabilitasi dan tidak akan dijatuhi hukuman pidana. Pecandu narkoba wajib melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), baik rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis. Selain melapor ke IPWL, pecandu narkoba juga bisa datang ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah



Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Berdasarkan pohon masalah tersebut di dapatkan beberapa penyebab yang timbul dari munculnya permasalahan utama yang diangkat, beberapa penyebab tersebut diantaranya,

- a) Minimnya tingkat keamanan. Salah satu penyebab permasalahan kriminalitas di suatu daerah tentunya tidak terlepas dari pengawasan aparat daerah setempat. Pengedaran narkoba yang dilakukan oleh para pemuda di beberapa wilayah tertentu Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung menunjukkan bahwasannya tingkat keamanan yang rendah. Meskipun yang melakukan pengedaran tersebut memang bukanlah dilakukan oleh warga asli setempat, melainkan dari pihak luar. Namun, tetap saja keamanan perlu ditingkatkan karena tindakan tersebut dilakukan di wilayah Kelurahan Cicaheum.

- b) Pergaulan bebas. Miris rasanya ketika melihat beberapa pemuda justru bukan hanya sebagai pelaku narkoba, tetapi juga sebagai pelaku pengedaran narkoba. Hal tersebut, bukanlah suatu hal yang harus diabaikan, karena para pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga. Maka dari itu, peran orang dewasa perlu lebih ditingkatkan perhatiannya kepada para pemuda, khususnya anak-anak usia dibawah umur.
- c) Lokasi pendistribusian yang sulit diketahui. Pengedaran narkoba ini dilakukan di beberapa wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung oleh para pemuda di beberapa titik tertentu. Karena pendistribusian ini dilakukan bukan melalui COD (*Cash On Delivery*)/tatap muka melainkan ditempatkan di tempat tertentu yang mana lokasi tersebut hanya diketahui oleh si pelaku dan pihak penerima.

## 2) Dampak Masalah

Dari penyebab yang ada maka akan timbul akibat yang akan terjadi dalam masyarakat terkait kurangnya pengetahuan dan pemahaman Kader PKK terhadap berbagai program kemsyarakatan yang ada. Adapun akibat yang ditimbulkan diantaranya seperti,

- a) Mudahnya pengedaran narkoba yang dilakukan. Akibat dari tingkat keamanan yang rendah, maka tindakan kriminalitas (pengedaran narkoba) yang dilakukan oleh para pelaku dapat dikatakan tinggi. Meskipun lokasi pengedaran tersebut dilakukan di beberapa titik tertentu, yang notabeneanya hanya diketahui oleh pengedar dan pembeli namun, tetap saja hal tersebut dilakukan di wilayah Kelurahan Cicaheum tersebut, sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bersama khususnya pihak keamanan.
- b) Menjadi salah satu lokasi pusat pengedaran narkoba. Seiring dengan berjalannya waktu, apabila tindakan kriminal tersebut berlangsung lama dan tidak cepat segera diatasi, maka akan dipastikan wilayah tersebut menjadi wilayah favorit bagi para pelaku pengedar narkoba ataupun bahkan menjadi salah satu pusat tempat pengedaran narkoba.
- c) Daerah tersebut dapat di-cap sebagai wilayah yang buruk. Berbagai macam tindakan kriminalitas yang tidak cepat segera diatasi, khususnya terkait pengedaran narkoba ini, lama-kelamaan daerah tersebut dapat diketahui oleh pihak luar dan di cap sebagai daerah yang buruk dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta minim tindakan perilaku kriminalitas.

### 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan berdasarkan gejala masalah yang dikemukakan di atas, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah **“Masih dijumpai kasus pengedaran narkoba oleh pemuda di beberapa wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.”**

#### b. Identifikasi Kebutuhan

- 1) Peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban di beberapa wilayah Kelurahan Cicaheum. Apabila tingkat kriminalitas telah berkembang dan semakin tinggi, maka tingkat keamanan yang dimiliki juga harus diperbaiki. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk dapat mencegah, meminimalisir serta menghilangkan tindakan kriminalitas di suatu daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggal setempat diantaranya, seperti jadwal ronda yang teratur, pengadaan *cctv* di beberapa titik tertentu, serta penambahan dan pelatihan aparat keamanan dan ketertiban.
- 2) Program rehabilitasi bagi para pelaku yang tertangkap. Apabila terdapat beberapa pelaku yang tertangkap basah oleh warga setempat ataupun oleh pihak keamanan, sebaiknya bukan malah melakukan pengucilan ataupun bahkan main hakim sendiri. Tetapi, mereka seharusnya dirangkul bersama, kemudian diberikan pengetahuan bahwa apa yang dilakukannya itu salah ataupun dapat juga diberikan pelatihan kerja. Sehingga, mereka memiliki keterampilan yang baik dalam menjadi seorang pekerja yang layak.
- 3) Meningkatkan peran orang tua terhadap para pemuda. Untuk menghindari segala bentuk kriminalitas dikalangan anak muda, tentunya peran orang dewasa atau orang tua perlu ditingkatkan. Sebab, peran orang dewasa dengan memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak muda, dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan anak-anak tersebut kedepannya. Demi menciptakan generasi penerus bangsa yang baik, maka seharusnya mereka mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang baik sejak dini.

#### c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sumber merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan keberfungsian sosial. Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan sistem sumber terbagi menjadi 3 yaitu,

- 1) Sistem sumber formal adalah sistem yang keanggotaannya di dalam suatu organisasi dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

sumber tersebut. Sistem sumber formal yaitu jajaran pemerintah di kelurahan Cicaheum. Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Di mana Pemerintah Kelurahan Cicaheum merupakan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa.

- 2) Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan secara emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan konkret . Sistem sumber informal yang terdapat di Kelurahan Cicaheum yaitu adanya Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), keluarga serta tetangga yang diharapkan dapat membantu memperoleh akses kepada sistem sumber lainnya dalam bentuk pemberian informasi dan mempermudah birokrasi.
- 3) Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan yaitu Dinas Sosial Kota Bandung dan pengelola keamanan dan ketertiban di Kelurahan Cicaheum

#### 4.

#### **Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Remaja menggunakan narkoba karena beberapa faktor (internal dan eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari diri seseorang, meliputi kepribadian dan faktor keluarga serta ekonomi. Kepribadian yang labil dapat dengan mudah terjerumus untuk menggunakan narkoba, sementara keluarga yang cenderung problematik dan kurang harmonis juga bisa mengakibatkan seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang kurang baik juga dapat mempengaruhi seseorang untuk berkeinginan menjadi seorang bandar ataupun kurir narkoba, namun sebaliknya seorang remaja yang dikategorikan datang dari keluarga yang berada dan berkecukupan namun kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan primernya, yakni keluarga atau terjebak dalam lingkungan yang memberikan pengaruh buruk akan lebih mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba (Libertus Jehani dan Antoro, 2006). Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri individu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tiap tindakan seseorang, begitu pula dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi pergaulan dan sosial masyarakat. Terdapat dampak dan dorongan yang cukup kuat dalam penyalahgunaan narkoba ini, salah satunya dari datang dari kelompok

pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat bermula dari teman sebaya terutama remaja yang memiliki kepribadian yang belum cukup matang. Sementara lingkungan sekunder yang baik dan memiliki kontrol yang tidak mudah goyah akan dapat mencegah ajakan atau dorongan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. (Libertus Jehani dan Antoro, 2006). Pengaruh teman sebaya, rasa keingin tahun yang besar serta pengaruh dari lingkungan keluarga yang tergolong kurang harmonis dapat menjadi pemicu dari penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan dan kemudahan akses untuk memperoleh narkoba juga dapat memicu seseorang sehingga berakhir menjadi pecandu narkoba. Di sekitaran kalangan remaja, awal mula perkenalan dengan narkoba seringkali diawali dengan merokok ataupun mengkonsumsi minuman beralkohol. Minimnya pengetahuan akan efek samping narkotika dan psikotropika yang buruk dapat menghasilkan dampak yang besar dalam mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba. (Herman, Wibowo & Rahman, 2018).

Menciptakan remaja yang bebas dari narkoba bukanlah hal mudah, Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan agar mencapai keefektifan yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga. Ketika remaja melakukan kesalahan dalam melakukan apapun seringkali orang tua emosi dan bermain fisik kepada anaknya tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Hal seperti itu merupakan hal yang salah karena sebaiknya sebagai orangtua dapat bersikap demokratis terhadap anaknya dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup. Maka dari itu penting bagi orangtua membangun suasana yang hangat dan nyaman kepada anak-anaknya agar mereka tidak mencari pelampiasan atau pelarian di luar rumah ketika menghadapi permasalahan.
- 2) Lingkungan sekolah. Pihak sekolah perlu memberikan edukasi serta informasi dasar mengenai narkoba sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- 3) Lingkungan masyarakat. Setiap stakeholder yang terdapat di masyarakat perlu konsisten dan bersikap adil serta tegas dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba serta didukung oleh pihak keamanan dan kepolisian. Selain ketiga hal tersebut, sosialisasi merupakan upaya penting untuk dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan terutama remaja dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya, Hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## b. Tujuan umum dan khusus

### 1) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas keamanan lingkungan tempat tinggal sekitar dengan meminimalisir, mencegah dan memberantas berbagai tindakan kriminalitas khususnya permasalahan pengedaran narkoba di beberapa wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.

### 2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan kinerja dari para pihak yang berwenang dalam mengamankan dan menertibkan wilayah
- b) Meningkatkan rasa solidaritas dan kepercayaan diantara pihak yang berwenang dalam bidang kemanan dan ketertiban dengan masyarakat Kelurahan Cicaheum
- c) Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat Kelurahan Cicaheum kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan sosial

## c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilaksanakan adalah “ **Program sosialisasi dan peningkatan kualitas keamanan serta ketertiban di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.**”

## d. Sistem Partisipan

Tabel 2.4.1 Tabel Sistem Partisipan Program Profil Analis Penataan Lingkungan

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2	<i>Agent of Change System</i>	Pekerja sosial
3	<i>Client System</i>	1. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 2. Anggota Linmas Kelurahan Cicaheum 3. Masyarakat Kelurahan Cicaheum
4	<i>Support System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Polres Kecamatan 3. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 4. RT dan RW Di Kelurahan Cicaheum
5	<i>Supervision System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Polres Kecamatan

		3. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum
6	<i>Executor System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Polres Kecamatan 3. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 4. Pekerja Sosial
7	<i>Target System</i>	1. Pemerintah Daerah Kelurahan Cicaheum 2. Anggota Linmas Kelurahan Cicaheum 3. Masyarakat Kelurahan Cicaheum
8	<i>Action System</i>	Pekerja Sosial

**e. Metode dan Teknik**

Metode yang digunakan adalah *Community Development* atau pengembangan masyarakat. Terdapat tiga model dalam pengembangan masyarakat yaitu pengembangan masyarakat lokal (*Locality development*), perencanaan sosial (*Social planning*), dan aksi sosial (*Social action*). (Rothman dan Tropman,1997). Dalam intervensi ini, praktikan akan menggunakan metode locality development. Locality development merupakan suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan ini akan berorientasi pada proses, tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar pada masyarakat yang ada, menekankan pentingnya terkait konsesus/kesepakatan, kerjasama, membangun identitas, kepedulian dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat. Teknik yang digunakan dalam sosialisasi di Kelurahan Cicaheum yaitu penyuluhan sosial dan *Focus Group Discussion* (FDG). Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan, teknik *Focus Group Discussion* (FDG) berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu mengenai pelaksanaan kegiatan iuran wajib di Kelurahan Cicaheum.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2.4.2 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analisis Penataan

NO	JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	SATUAN HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
<b>LOGISTIK</b>					
1	<b>Pendataan</b>				
	1) ATK	1	Paket	200.000	200.000
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) <i>Banner</i>	2	Lembar	90.000	180.000
	2) <i>Doorprize</i>	10	Paket	20.000	200.000
<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					580.000
<b>TRANSPORTASI</b>					
2	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>	-	-	-	-
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>				-
<b>KONSUMSI</b>					
3	<b>Pendataan</b>				
	1) Petugas	4	Orang	10.000	40.000
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	2) Staff Kelurahan	5	Orang	10.000	50.000
	3) Linmas	10	Orang	10.000	100.000
	4) Peserta	20	Orang	20.000	400.000
<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					610.000
<b>HONORARIUM</b>					
4	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	500.000	1.000.000
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					1.000.000
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b>2.190.000</b>

## 2) Alat yang Dibutuhkan

Tabel 2.4.3 Tabel Alat dan Bahan Program Profil Analis Penataan Lingkungan

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Pendataan	ATK
2	Penyuluhan	ATK <i>Banner</i> Lokasi penyelenggaraan Kursi Meja Alat dokumentasi <i>Soundsystem</i> <i>Microphone</i> <i>Proyektor</i> Layar <i>Doorprize</i>
3	Pemantauan	ATK

### g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam program, atau mengevaluasi. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan program atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Tujuan dari analisis ini untuk menilai dan menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan, dan dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, risiko, potensial, dan strategi dalam pelaksanaan program.

Tabel 2.4.4 Tabel Analisis Kelayakan Program Profil Analis Penataan Lingkungan

<b>Faktor Internal</b>	<p><b>(S) Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Kota Bandung</li> <li>2. TKSK Kecamatan Kiaracondong</li> <li>3. Dukungan Pemerintah Kelurahan, RW dan RT</li> </ol>	<p><b>(W) Weakness</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya fasilitas keamanan yang dimiliki di wilayah Kelurahan Cicaheum</li> <li>2. Lokasi pengedaran yang dilakukan yang sulit diketahui</li> <li>3. Rasa takut yang dimiliki oleh sebagian masyarakat dalam melaporkan tindakan kriminalitas</li> </ol>
<b>Faktor Eksternal</b>		

<p><b>(O) Oportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat kerja yang dimiliki oleh pihak keamanan dan ketertiban Kelurahan Cicaheum</li> <li>2. Dukungan dari Polres Kecamatan Kiaracandong</li> <li>3. Dukungan dari RT dan RW di wilayah Kelurahan Cicaheum</li> <li>4. Dukungan masyarakat Kelurahan Cicaheum</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan masyarakat dalam menjaga kemanan dan ketertiban lingkungan bersama</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keterampilan dan fasilitas dalam menertibkan keamanan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan kriminalitas</li> </ol>
<p><b>(T) Threat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku tindak kriminalitas yang berkomplotan</li> <li>2. Pemuda setempat dapat terpengaruh oleh pergaulan bebas jika dibiarkan</li> <li>3. Tingkat kriminalitas yang kian meningkat</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan personil kemanan dan ketertiban lingkungan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan peran keluarga dalam mendidik para pemuda khususnya anak-anak mereka</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelatihan kepada anggota Linmas dalam mengamankan dan menertibkan lingkungan sekitar</li> <li>2. Mengatur jadwal kerja pemantauan dan pemeliharaan lingkungan yang baik</li> </ol>

## **h. Jadwal dan Langkah-langkah**

### **1) Jadwal Kegiatan**

Pelaksanaan program mengenai pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Cicaheum dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu dengan mengadakan sosialisasi, peningkatan kemampuan dalam menciptakan lingkungan yang aman, *Focus Group Discussion* (FDG), dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi program. Jadwal pada program disusun berdasarkan kebutuhan dan sasaran kegiatan

Tabel 2.4.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Program Profil Analis Penataan Lingkungan

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	PJ	Jadwal Kerja	Anggaran
1	Sosialisasi edukasi pentingnya menindak lanjuti tindakan kriminalitas	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggal yang baik	Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan seluruh masyarakat	Dinsos Kota Bandung, Polda , Pemerintah daerah setempat dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
2	Program pelatihan keterampilan dalam menertibkan lingkungan	Meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari tindakan kriminalitas	Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan seluruh masyarakat	Dinsos Kota Bandung, Polda , Pemerintah daerah setempat dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
3	<i>Focus Group Discussion</i>	Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan seluruh masyarakat dapat mengetahui permasalahan dan kendala yang dialami dalam menciptakan lingkungan yang aman	Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan seluruh masyarakat	Dinsos Kota Bandung, Polda , Pemerintah daerah setempat dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

4	Monitoring dan Evaluasi	Mengetahui kendala dalam melaksanakan program dan melihat perubahan yang dialami	Pemerintah Kelurahan Cicaheum, Linmas dan seluruh masyarakat	Dinsos Kota Bandung, Polda , Pemerintah daerah setempat dan Pekerja Sosial	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
---	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------

## 2) Langkah-Langkah Kegiatan

### a) Pra Pelaksanaan

- (1) Identifikasi peserta kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman dan kualitas keamanan di Kelurahan Cicaheum yaitu Anggota Linmas (Lingkungan Masyarakat) sebagai sasaran utama
- (2) Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu Polisi Resort Kecamatan Kiaracondong dan Dinas Sosial Kota Bandung
- (3) Penyiapan materi yang akan digunakan untuk melaksanakan sosialisasi adalah pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal sekitar dari berbagai bentuk tindakan kriminalitas
- (4) Penetapan narasumber dalam kegiatan sosialisasi adalah Polisi Resort Kecamatan Kiaracondong dan Dinas Sosial Kota Bandung
- (5) Penyiapan lokasi kegiatan Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di Aula Kelurahan Cicaheum

### b) Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi pemahaman dan keterampilan dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman dilakukan satu hari dalam dua sesi.

- (1) Sesi pertama membahas mengenai pengetahuan dan pemahaman pihak terkait dalam menjaga dan menertibkan lingkungan
- (2) Sesi kedua membahas mengenai keterampilan yang harus dimiliki dalam mengatasi permasalahan tindak kriminalitas

### c) Pasca Pelaksanaan

- (1) Monitoring kepada Anggota Linmas terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi
- (2) Menyusun laporan

#### **i. Indikator Keberhasilan**

- 1) Meningkatnya kualitas kinerja dari para pihak yang berwenang dalam mengamankan dan menertibkan wilayah
- 2) Meningkatnya rasa solidaritas dan kepercayaan diantara pihak yang berwenang dalam bidang kemanan dan ketertiban dengan masyarakat Kelurahan Cicaheum
- 3) Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat Kelurahan Cicaheum kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan sosial

### **E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana**

#### **1. Gambaran Umum Masalah**

Salah satu sumber air yang sangat tercemar saat ini yaitu sungai. Sungai yang ada di Indonesia kebanyakan tidak sehat padahal fungsi sungai bagi manusia sangat banyak. Tidak hanya itu saja namun fungsi sungai juga banyak sekali bagi ekosistem yang ada di sungai tersebut. Definisi tepat bagi pencemaran air dibagi menjadi dua kelompok yaitu dengan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat maupun komponen lainnya yang dapat menyebabkan kelebihan pada bahan baku mutu yang telah ditetapkan. Terjadinya pencemaran sungai diakibatkan oleh dua sumber yang pertama yaitu sumber tertentu. Contoh dari sumber tertentu ini merupakan hasil dari suatu aktivitas industri serta dari suatu limbah domestik terpadu. Pencemaran secara kimia saja dapat dibagi menjadi dua yaitu kimia organik serta kimia anorganik. Pencemaran yang timbul dari tiga faktor tersebut jika melebihi baku mutu akan memiliki dampak negatif bagi biota perairan serta manusia jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Firmansyah et al, 2021). Parameter pencemaran sungai lainnya yaitu tingginya tingkat nilai kebutuhan oksigen kimia atau COD (*Chemical Oxygen Demand*), dan juga kebutuhan oksigen biologi atau BOD (*Biological Oxygen Demand*), fosfor yang terkandung dalam air sungai serta nilai derajat keasaman pH yang ada pada aliran sungai tersebut (Agustina et al, 2017). Jika nilai dari BOD dan COD melebihi dari ketentuan baku standart maka akan berdampak pada timbulnya bau air sungai yang begitu menyengat dan warna dari air sungai tersebut akan menjadi sangat keruh dan juga hitampekat. Dari peristiwa tersebut berdampak besar pada lingkungan disekitarnya. Kondisi sungai yang sangat memprihatinkan mengakibatkan banyaknya aktivitas manusia akan terhenti seperti halnya mencari ikan, penjual makanan disekitar aliran sungai dan pabrik, serta petani. Dampak lain dari pencemaran sungai ini adalah ekosistem sungai yang mati dan banyak bakteri serta virus yang muncul akibat hal tersebut dan tidak sedikit masyarakat dialiran sungai yang tercemar terkena sakit.

## 2. Tinjauan Konsep

### a. Konsep Penanggulangan Bencana

#### 1) Pengertian Penanggulangan Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007). Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup;
- b) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
- c) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman;
- d) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;
- e) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;

f) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

## 2) Tahapan Penanggulangan Bencana

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

a) Tahap Pra Bencana (mencakup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).

(1) Pencegahan (*prevention*) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya).

(2) Mitigasi Bencana (*Mitigation*) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui,

(a) pelaksanaan penataan ruang;

(b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan

(c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).

(3) Kesiapsiagaan (*Preparedness*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain:

(a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

(b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

(c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

(d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

(e) penyiapan lokasi evakuasi;

(f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan

(g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (4) Peringatan Dini (*Early Warning*) merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi.
- b) Tahap saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian
- (1) Tanggap Darurat (*response*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain:
- (a) pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - (b) penentuan status keadaan darurat bencana;
  - (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - (d) pemenuhan kebutuhan dasar;
  - (e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - (f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ( UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penaangulangan Bencana).
- (2) Bantuan Darurat (*relief*) merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih
- c) Tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (1) Pemulihan (*recovery*) adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah
- (a) perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - (b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- (d) pemulihan sosial psikologis;
  - (e) pelayanan kesehatan;
  - (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - (g) pemulihan sosial ekonomi budaya, dan
  - (h) pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkahlangkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

## **b. Konsep Pencemaran Air**

### **1) Pengertian Pencemaran Air**

Pencemaran air merupakan kondisi yang diakibatkan adanya masukan beban pencemar/limbah buangan yang berupa gas, bahan yang terlarut, dan partikulat. Pencemar yang masuk ke dalam badan perairan dapat dilakukan melalui atmosfer, tanah, limpasan/run off dari lahan pertanian, limbah domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain (Effendi, 2003). Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Menurut PP 82 tahun 2001, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## 2) **Sumber Pencemaran Air**

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung:

- a) Sumber langsung (*point source*) Sumber langsung merupakan sumber pencemaran yang berasal dari titik tertentu yang ada di sepanjang badan air penerima dengan sumber lokasi yang jelas. Titik lokasi pencemaran terutama berasal dari pipa pembuangan limbah industri yang tidak mengolah limbahnya maupun pembuangan hasil pengolahan limbah di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang masuk ke badan air penerima (Sarminingsih dkk, 2014).
- b) Sumber tidak langsung (*non-point source*) Sumber tak langsung merupakan sumber yang berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, industri kecil/menengah, dan domestik yang berupa penggunaan dari barang konsumsi (Irsanda dkk, 2014).

## 3) **Hukum Pidana Bagi Para Pelaku Pencemaran Lingkungan**

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup merupakan kewajiban semua pihak yaitu masyarakat maupun pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat sanksi yang jelas, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat mengancam siapapun yang lalai dan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kasus pencemaran lingkungan hidup tidak hanya termasuk dalam ranah hukum pidana tetapi hukum perdata juga. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menjelaskan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup di definisikan sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Mengingat bahwa air adalah salah satu komponen dari lingkungan hidup, maka pencemaran air merupakan spesifikasi dari pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, pencemaran air juga berimplikasi terhadap masalah hukum.

Pencemaran air perlu dikendalikan karena hal ini menyangkut mengenai ketersediaan sumber daya air agar tidak menyebabkan

kerugian bagi masyarakat. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Kurangnya sumber daya manusia dan ahli lingkungan hidup yang bertugas di pemerintahan kota Surakarta menjadi faktor yang membuat pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas tidak dapat melakukan tugas dan kewenangan secara maksimal. Mengacu pada tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kota Surakarta belum pernah menindak lanjuti kegiatan atau usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran air tersebut. Hal tersebut belum sesuai dengan aturan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota”. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran air, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a) Pasal 97 Tindak Pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.
- b) Pasal 98
  - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/ atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c) Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d) Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

e) Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pada pasal-pasal tersebut jelas tertulis ketentuan pidana yang akan diberikan kepada setiap orang yang terbukti melakukan pencemaran air. Belum adanya pelaku usaha yang menerima sanksi pidana tersebut membuktikan pula bahwa belum adanya penyidikan, penyelidikan dan penegakan hukum dari aparat kepolisian.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah



Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Profil Analisis Penanggulangan Bencana

Berdasarkan pohon masalah tersebut di dapatkan beberapa penyebab yang timbul dari munculnya permasalahan utama yang diangkat, beberapa penyebab tersebut diantaranya,

- a) Perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Tingkat kepedulian perusahaan itu sendiri, menjadi faktor utama keegoisan perusahaan dalam kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Kebanyakan perusahaan besar justru fokus terhadap apa yang mereka kerjakan tanpa memerhatikan beberapa hal yang dapat merugikan lingkungan sekitar, salah satunya yakni dengan membuang limbah di tempat yang tidak seharusnya.
- b) Tidak memiliki tempat pembuangan pribadi. Tingkat kepedulian perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar yang rendah dan hal tersebut tidak diatasi dengan baik oleh para pemerintah daerah setempat, mengakibatkan perusahaan tersebut-pun melakukan tindakannya sewenang-wenang. Seharusnya perusahaan

besar seperti PT. NAGAMAS tersebut memiliki tempat pembuangan limbah pribadi/khusus, sehingga tidak mengganggu kondisi lingkungan sekitar yang ada.

- c) Kurangnya kesadaran dan kemampuan. Salah satu faktor lainnya dalam tindakan pengrusakkan lingkungan sekitar tersebut adalah kurangnya kesadaran dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut terhadap pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal sekitar yang ramah, bersih, aman dan nyaman.

## 2) Dampak Masalah

Dari penyebab yang ada maka akan timbul akibat yang akan terjadi dalam masyarakat terkait kurangnya pengetahuan dan pemahaman Kader PKK terhadap berbagai program kemsyarakatan yang ada. Adapun akibat yang ditimbulkan diantaranya seperti,

- a) Polusi air. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai (Cipamokolan) dapat menimbulkan polusi air, yang dimana tentunya hal tersebut bukanlah hal yang bagus bagi lingkungan tempat tinggal sekitar. Akibat yang ditimbulkan dari polusi air diantaranya, seperti pencemaran air oleh zat-zat berbahaya tertentu, aroma yang tidak sedap, dan kondisi air yang keruh serta menjadi sumber penyakit.
- b) Tidak ramah lingkungan. Polusi air yang timbul akibat dari pembuangan limbah pabrik ditempat yang tidak seharusnya, menjadi salah satu penyebab utama tidak ramahnya suatu lingkungan. Karena, hal tersebut dapat mengakibatkan tingkat kenyamanan penduduk dalam bertempat tinggal di sekitar sungai tersebut menjadi tidak nyaman.
- c) Terganggunya keberlangsungan makhluk hidup. Air menjadi salah satu sumber utama dalam keberlangsungan makhluk hidup. Apabila kondisi air tercemar, maka hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Seperti misalnya, menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman bagi warga sekitar, rusaknya kehidupan tanaman dan juga hewan-hewan air tidak dapat hidup dengan baik didalamnya, bahkan justru menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar.

## 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan berdasarkan gejala masalah yang dikemukakan di atas, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah **“Permasalahan limbah dari Perusahaan PT. NAGAMAS di Sungai Cipamokolan.”**

## **b. Identifikasi Kebutuhan**

- 1) Diskusi bersama pihak perusahaan. Dalam mengatasi permasalahan limbah ini, tentunya hal yang paling utama adalah menemui pihak terkait untuk melakukan diskusi terkait dengan permasalahan limbah yang mencemari sungai Cipamokolan tersebut. Diskusi ini penting dilakukan untuk dapat menentukan keputusan bersama, sehingga keputusan yang diambil bukan dari sepihak saja. Selain dapat mengatasi permasalahan tersebut secara bersama, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan hubungan yang baik diantara pihak perusahaan, pemerintah daerah setempat dan warga sekitar.
- 2) Meningkatkan solidaritas masyarakat. Selagi tahap diskusi dilakukan, pada waktu yang bersamaan, pemerintah daerah setempat dapat menghimbau dan mengajak kepada warga sekitar untuk melakukan beberapa langkah dalam pencegahan atau meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada, khususnya pencemaran air akibat limbah di sungai Cipamokolan. Beberapa langkah tersebut dapat dilakukan seperti, melakukan penanaman tanaman disepanjang pinggir sungai tersebut, pemasangan jaring di beberapa titik tertentu untuk memudahkan pengambilan sampah yang ada, kerja bakti, dan lain sebagainya.

## **c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sumber merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan keberfungsian sosial. Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan sistem sumber terbagi menjadi 3 yaitu,

- 1) Sistem sumber formal adalah sistem yang keanggotaannya di dalam suatu organisasi dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Sistem sumber formal yaitu jajaran pemerintah di kelurahan Cicaheum. Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, serta, Pemerintah Kelurahan Cicaheum merupakan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa.
- 2) Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan secara emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan konkret . Sistem sumber informal yang terdapat di Kelurahan Cicaheum yaitu adanya Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), keluarga serta tetangga yang diharapkan dapat membantu memperoleh akses kepada sistem

sumber lainnya dalam bentuk pemberian informasi dan mempermudah birokrasi.

- 3) Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan yaitu Dinas Sosial Kota Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

#### 4.

#### **Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, dan sebagainya. Di zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk di dapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga menyebabkan kualitas air menurun, begitupun dengan kuantitasnya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Dalam PP No 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air di definisikan sebagai: "Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. (Pasal 1, angka 2). Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam, seperti gunung meletus, pertumbuhan gulma yang sangat cepat, badai dan gempa bumi merupakan penyebab

utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), polutan anorganik (padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpaham minyak tanah dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Disamping itu penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga seperti sampah organik (sisa-sisa makanan), sampah anorganik (plastik, gelas, kaleng) serta bahan kimia (detergen, batu batere) juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air tanah. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, pathogen/bakteri dan perubahan sifat Fisika dan kimia dari air. Banyak unsur-unsur kimia merupakan racun yang mencemari air. Patogen/bakteri mengakibatkan pencemaran air sehingga menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang. Adapun sifat fisika dan kimia air meliputi derajat keasaman, konduktivitas listrik, suhu dan pertilisasi permukaan air. Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pencemaran air (air permukaan dan air tanah) merupakan penyebab utama gangguan kesehatan manusia/penyakit. Lemahnya pengawasan pemerintah serta keengganan untuk melakukan penegakan hukum secara benar menjadikan problem pencemaran air menjadi hal yang kronis yang makin lama makin parah.

**b. Tujuan umum dan khusus**

**1) Tujuan Umum**

Mengatasi permasalahan limbah di Sungai Cipamokolan yang dapat menimbulkan polusi air sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan.

**2) Tujuan Khusus**

- a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga Kelurahan Cicaheum terkait pentingnya menjaga kesehatan lingkungan sekitar
- b) Meningkatkan kerjasama dan solidaritas warga dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat
- c) Mengatasi berbagai macam kerusakan akibat limbah, seperti tingkat kesehatan air, sumber penyakit, serta seluran air yang tidak lancar

**c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Program yang akan dilaksanakan adalah “**Kegiatan sosialisasi pemberian edukasi kepada pihak industri dan masyarakat terkait pentingnya peduli lingkungan sekitar.**”

**d. Sistem Partisipan**

Tabel 2.5.1 Tabel Sitem Partisipan Profil Penanggulangan Bencana

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2	<i>Agent of Change System</i>	Pekerja sosial
3	<i>Client System</i>	1. Perusahaan PT. NAGAMAS 2. Masyarakat Kelurahan Cicaheum
4	<i>Support System</i>	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Pemerintah Kelurahan Cicaheum 3. Dinas Lingkungan Hidup
5	<i>Supervision System</i>	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Kelurahan Cicaheum
6	<i>Executor System</i>	1. Pemerintah Kelurahan Cicaheum 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Perusahaan PT. NAGAMAS 4. Masyarakat Kelurahan Cicaheum
7	<i>Target System</i>	1. Perusahaan PT. NAGAMAS 2. Masyarakat Kelurahan Cicaheum
8	<i>Action System</i>	Pekerja Sosial

**e. Metode dan Teknik**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program peningkatan kesadaran perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup yaitu dengan menggunakan metode *Community Organization Community Development (COCD)*. Pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu. Metode ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang tertentu. Sedangkan pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu. Tujuan

pertolongannya untuk memecahkan masalah sosial melalui usaha bersama yang terencana dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Cicaheum yang berupaya meningkatkan perhatian akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan hidup.

Teknik yang digunakan dalam peningkatan upaya peduli lingkungan hidup yaitu dengan teknik edukasi dan kolaborasi. Teknik edukasi berarti suatu proses memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam usaha meningkatkan kapasitas diri dengan melakukan pelatihan, pengajaran, proses dan cara mendidik. Teknik ini dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kebencanaan. Dalam pengembangan sosial masyarakat, salah satu taktik yang digunakan adalah kolaborasi yang menunjukkan adanya hubungan antara kedua sistem yaitu sistem sasaran dengan sistem pelaksana perubahan, yang mana kedua sistem tersebut saling menyetujui dilakukannya perubahan. Program ini merupakan kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintahan Kelurahan Cicaheum dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan**

**1) Rencana Anggaran Biaya**

Tabel 2.5.2 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program Profil Analis Penanggulangan

NO	JENIS KEGIATAN	VOL	SATUAN	SATUAN HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
<b>LOGISTIK</b>					
<b>1</b>	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) <i>Banner</i>	1	Lembar	90.000	90.000
	2) <i>Doorprize</i>	10	Paket	20.000	200.000
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					290.000
<b>KONSUMSI</b>					
<b>2</b>	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	2) Tamu undangan	10	Orang	10.000	100.000
	3) Peserta	20	Orang	10.000	200.000
<b>JUMLAH</b>					320.000
<b>HONORARIUM</b>					

3	<b>Pendataan</b>	-	-	-	-
	<b>Penyuluhan</b>				
	1) Narasumber	2	Orang	500.000	1.000.000
	<b>Pemantauan</b>	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					1.000.000
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b>1.610.000</b>

## 2) Alat yang Dibutuhkan

Tabel 2.5.3 Tabel Alat dan Bahan Profil Penanggulangan Bencana

NO	Kegiatan	Alat dan Bahan
1	Pendataan	-
2	Penyuluhan	ATK <i>Banner</i> Lokasi penyelenggaraan Kursi Meja Alat dokumentasi <i>Soundsystem</i> <i>Microphone</i> <i>Proyektor</i> Layar <i>Doorprize</i>
3	Pemantauan	-

### g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam program, atau mengevaluasi. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan program atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Tujuan dari analisis ini untuk menilai dan menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan, dan dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, risiko, potensial, dan strategi dalam pelaksanaan program.



melestarikan lingkungan		
<b>(T) Threat</b> 1. Sebagian masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah dalam pelestarian lingkungan 2. Sampah dan atau limbah kiriman dari tempat lain yang mengalir melalui sungai	<b>Strategi ST</b> 1. Memberikan edukasi kepada sebagian masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 2. Melibatkan seluruh pihak terkait dalam program peduli lingkungan	<b>Strategi WT</b> 1. Meningkatkan dan memaksimalkan pihak terlibat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

#### h. Jadwal dan Langkah-langkah

##### 1) Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program mengenai pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Cicaheum dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu dengan mengadakan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FDG), dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi program. Jadwal pada program disusun berdasarkan kebutuhan dan sasaran kegiatan.

Tabel 2.5.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Profil Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	PJ	Jadwal Kerja	Anggaran
1	Sosialisasi edukasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh masyarakat Kelurahan Cicaheum terkait pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan	Seluruh warga Kelurahan Cicaheum	Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Pemerintah Kelurahan Cicaheum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

		tempat tinggal sekitar				
2	<i>Focus Group Discussion</i>	Mengetahui permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat	Seluruh warga Kelurahan Cicaheum	Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Pemerintah Kelurahan Cicaheum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum
3	Monitoring dan Evaluasi	Melihat perubahan dan berbagai kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung	Seluruh warga Kelurahan Cicaheum	Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Pemerintah Kelurahan Cicaheum	1 Hari	Pemerintah Kelurahan Cicaheum

## 2) Langkah-Langkah Kegiatan

### a) Pra Pelaksanaan

- (1) Identifikasi peserta kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Kelurahan Cicaheum yaitu Seluruh warga Kelurahan Cicaheum
- (2) Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung
- (3) Penyiapan materi yang akan digunakan untuk melaksanakan sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat tinggal
- (4) Penetapan narasumber dalam kegiatan sosialisasi yakni, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung
- (5) Penyiapan lokasi kegiatan Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di Aula Kelurahan Cicaheum

**b) Pelaksanaan**

Kegiatan sosialisasi pembaharuan DTKS dilakukan satu hari dalam dua sesi.

- (1) Sesi pertama membahas mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan
- (2) Sesi kedua membahas mengenai cara mengelola lingkungan yang baik dan permasalahan yang dihadapi

**c) Pasca Pelaksanaan**

- (1) Monitoring kepada seluruh pihak terkait
- (2) Menyusun laporan

**i. Indikator Keberhasilan**

- 1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh warga Kelurahan Cicaheum terkait pentingnya menjaga kesehatan lingkungan sekitar
- 2) Meningkatnya kerjasama dan solidaritas warga dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat
- 3) Teratasinya berbagai macam kerusakan akibat limbah, seperti tingkat kesehatan air, sumber penyakit, serta seluran air yang tidak lancar

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Kegiatan praktikum laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari hingga 15 April 2023 dengan lima profil yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dilaksanakan di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong. Praktikum laboratorium ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isu permasalahan terkait dengan lima profil yang sudah ditetapkan, kemudian dapat mengasah kemampuan praktikan dalam mengaplikasikan teknologi dan teori mengenai perlindungan dan pemberdayaan sosial untuk menyusun rencana intervensi. Berdasarkan hasil analisis praktikan terhadap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

##### **1. Analisis Jaminan Sosial**

Dalam profil analisis jaminan sosial, praktikan memilih isu mengenai Permasalahan Sektor Informal yang masih belum terdaftar sebagai peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan tersebut dipilih karena melihat kondisi lapangan, dimana di wilayah Kelurahan Cicaheum tersebut mayoritas penduduknya berprofesi dalam bidang sektor usaha informal. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program Sejalin Informal: Sejahterakan dan lindungi usaha sektor informal Masyarakat Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.

##### **2. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial**

Dalam profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan memilih isu mengenai permasalahan ketidaksesuaian mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian bantuan sosial di Kelurahan Cicaheum. Permasalahan tersebut disebabkan masih terdapat permasalahan bantuan sosial seperti bantuan tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya prosedur pelayanan pemberian bantuan sosial ini masih perlu diperbaiki. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan menyusun rencana intervensi melalui Sosialisasi dan pelatihan tentang prosedur pemberian dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah.”

##### **3. Analisis Pemberdayaan Sosial**

Praktikan dalam profil analisis pemberdayaan sosial mengangkat isu Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kader TP PKK Kelurahan Cicaheum pada program-program yang dilaksanakan di Kelurahan

Cicaheum. Permasalahan tersebut disebabkan karena rendahnya keaktifan kader TP PKK dalam program kemasyarakatan yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, praktikan merumuskan rencana intervensi berupa Sosialisasi program kemasyarakatan Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung.

4. Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Pada analisis penataan lingkungan sosial, praktikan menemukan isu permasalahan terkait dengan Masih dijumpai kasus pengedaran narkoba oleh beberapa pemuda di wilayah Kelurahan Cicheum. Hal tersebut dapat terjadi karena masih rendahnya tingkat keamanan yang dimiliki oleh pihak Kelurahan Cicaheum. Berdasarkan hal tersebut, praktikan merumuskan rencana intervensi mengenai Program sosialisasi dan peningkatan keamanan di wilayah Kelurahan Cicaheum.

5. Analisis Penanggulangan Bencana

Dalam analisis penanggulangan bencana, praktikan mengangkat permasalahan mengenai Permasalahan limbah dari perusahaan PT NAGAMAS (tekstil) di sungai cipamokolan. Hal tersebut dapat terjadi karena melihat dari kondisi sungai yang ada dan salah satu penyebab pencemaran air dapat terjadi yakni akibat limbah perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, praktikan merumuskan rencana intervensi mengenai Kegiatan edukasi masyarakat peduli lingkungan sekitar.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah diikuti oleh praktikan terkait fokus 5 (lima) profil yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada :

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

- a. Diharapkan para tim dosen Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial kedepannya memiliki penyamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum laboratorium dan penulisan laporan akhir praktikum laboratorium sehingga informasi penting akan cepat tersampaikan;
- b. Ketika proses praktikum laboratorium sedang berlangsung, untuk kedepannya diharapkan para praktikan mendapatkan waktu penugasan yang lebih sesuai karena praktikan selain mendapatkan penugasan dari praktikum laboratorium tetapi mendapatkan penugasan pula dari mata kuliah yang sedang diampu.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial
  - a. Dalam penyelenggaraan kegiatan praktikum dapat memperhatikan mengenai ketentuan pelaksanaan praktikum berikut dengan mekanisme perizinan, cakupan wilayah dan metode yang digunakan dalam praktik
  - b. Diharapkan kedepannya ada kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung terkait dengan pemberian subsidi berupa anggaran dana yang dapat diberikan kepada para praktikan dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan praktikum.

## DAFTAR PUSTAKA

*Konsep Jaminan Sosial* | [http://repository.radenfatah.ac.id/15546/3/3\\_BAB%20II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/15546/3/3_BAB%20II.pdf)

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN* [https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003.pdf](https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf)

*BPJS KETENAGAKERJAAN* | <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

*BPJS Ketenagakerjaan Beri Asuransi Kepada Pekerja Informal*  
<https://jabar.antaranews.com/berita/65402/bpjs-ketenagakerjaan-beri-asuransi-kepada-pekerja-informal>

*Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal*  
<http://balatrans.disnakertrans.jabarprov.go.id/index.php/web/berita/detail/168/jaminan-sosial-bagi-pekerja-informal>

*BPJAMSOSTEK minta pekerja informal daftar kepesertaan*  
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28229/BPJAMSOSTEK-minta-pekerja-informal-daftar-kepesertaan>

*Masih Jadi Tantangan, BP Jamsostek Terus Jangkau Pekerja Sektor Informal*  
<https://infobanknews.com/masih-jadi-tantangan-bp-jamsostek-terus-jangkau-pekerja-sektor-informal/>

*Tak Paham Manfaat, Kepesertaan Pekerja Informal BPJS Ketenagakerjaan Perlu Ditingkatkan* | <https://www.kompas.tv/article/331181/tak-paham-manfaat-kepesertaan-pekerja-informal-bpjs-ketenagakerjaan-perlu-ditingkatkan>

*PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN AKUNTABILITASNYA*  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>

*Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial* | <https://solidaritas.jabarprov.go.id/>

*Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maladministrasi*  
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>

*MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2018* |  
[https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Tulisan-Hukum-Rev-Mas-Adi-ke-2\\_Mekanisme-Pemberian-Hibah-Bansos-yang-bersumber-dari-APBD-pasca-Permen-13-2018\\_upload-web.pdf](https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Tulisan-Hukum-Rev-Mas-Adi-ke-2_Mekanisme-Pemberian-Hibah-Bansos-yang-bersumber-dari-APBD-pasca-Permen-13-2018_upload-web.pdf)

*Agar Tepat Sasaran, Menko PMK Rekomendasikan Penyaluran Bantuan Sosial Mengacu Data dari Pusat* | <https://www.kemenkopmk.go.id/agar-tepat-sasaran-menko-pmk-rekomendasikan-penyialuran-bantuan-sosial-mengacu-data-dari-pusat>

*Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya*  
<https://www.gramedia.com/literasi/strategi-pemberdayaan-masyarakat/>

*PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN* |  
<http://lib.unnes.ac.id/33958/1/3301414110maria.pdf>

*DAMPAK PROGRAM KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TERHADAP PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN* |  
<http://eprints.uny.ac.id/27143/1/Radika%20Wahyu%20Setyoaji.pdf>

*PKK Miliki Peran Penting Dalam Pembangunan* |  
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pkk-miliki-peran-penting-dalam-pembangunan/>

*PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK PKK*  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55441/1/RIRIE%20RIHASTUTI%20HADININGSIH.FISIP.pdf>

*IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN*  
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18178/1/188520128%20-%20Ayu%20Utami%20-%20Fulltext.pdf>

*PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA*  
<https://environmentalsanitation.wordpress.com/2012/11/20/penataan-lingkungan-sosial-dan-budaya/>

*Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan* |  
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

*NARKOBA / NAPZA* | <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

*NARKOTIKA DAN SANKSI HUKUMNYA* | <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>

*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA*

<https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahgunaan-dan-pengedar-narkoba>

*TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>

*MODUL KONSEP DAN KARAKTERISTIK BENCANA*

[https://simantu.pu.go.id/epel/edok/b9b42\\_03.\\_Modul\\_3\\_Konsep\\_dan\\_Karakteristik\\_Bencana.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/b9b42_03._Modul_3_Konsep_dan_Karakteristik_Bencana.pdf)

*Sistem Penanggulangan Bencana |*

<https://www.bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>

*PENCEMARAN AIR PENGERTIAN, PENYEBAB DAN DAMPAKNYA*

<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/PENCEMARAN%20AIR%2C%20PENGERTIAN%2C%20PENYEBAB%20DAN%20DAMPAKNYA.pdf>

*PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM AKIBAT LIMBAH CAIR INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*

<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/14112>

*Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af>

## LAMPIRAN

### A. Surat Undangan Lokakarya

Lampiran 1. Surat Undangan Lokakarya



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**

Jl. Dr. H. Jusuf No.307 Bandung 40131 Telp.(022) 2504838, 2500130 Faks.(022) 2502962 <http://www.poltekkesosia.id>

Nomor : 0994 / 9.7/KS.01/04/2023 Bandung, 10 April 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Lokakarya

Kepada:  
**Yth. Lurah Kelurahan Cicaheum**  
**Kecamatan Klaracondong**  
di  
Bandung

Sehubungan dengan akan berakhinya Praktikum Laboratorium mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos) Poltekkes Bandung, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk menghadiri Lokakarya yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat/ 14 April 2023**  
Waktu : **Pk. 09.00 – 11.30 WIB**  
Acara : Lokakarya Praktikum Laboratorium Mahasiswa Poltekkes Bandung  
Tempat : Kantor Kelurahan Cicaheum

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perkenannya disampaikan terima kasih.




Tembusan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cicaheum
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cicaheum
3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cicaheum
4. Ketua PKK
5. Ketua RW Kelurahan Cicaheum

## B. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Lisan Praktikum Laboratorium

Lampiran 2. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Lisan  
Praktikum Laboratorium

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL**  
**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330  
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

---

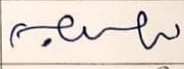
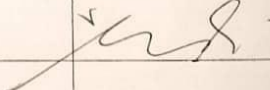
**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**  
**PROGRAM SARJANA TERAPAN**

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN UJIAN LISAN PRAKTIKUM LABORATORIUM**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pada hari ini...Selasa... Tanggal 2 Mei 2023..., telah dilakukan Ujian Lisan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung Tahun Akademik 2022/2023 di ruang : C 2.6...

Nama : Muhammad Fauzan Pwiatmadja.....  
NRP : 20.03.095.....  
Judul : Laporan Praktikum Laboratorium  
Program Studi Perlindungan dan  
Pemberdayaan Sosial  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya :

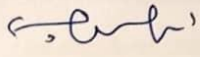
NO	NAMA PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	Milly Mildawati	
2.	Drs. Suradi, M.Si	

Bandung, 2 Mei 2023

Mengetahui  
Ketua Prodi Perlindungan dan  
Pemberdayaan Sosial

Ketua Sidang

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D  
NIP. 19640328 199003 2 003

  
Milly Mildawati  
NIP. 096208121988032002

### C. Absensi Praktikan di Kelurahan Cicaheum

Lampiran 3. Absensi Praktikan di Kelurahan Cicaheum

ABSENSI KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM														
NO	NAMA	NRP	FEBRUARI											
			8	9	10	15	16	17	22	23	24			
1.	Dennia Putri Humaira	20.03.012												
2.	Egidia Regita Putri K	20.03.014												
3.	Muhammad Ridhwan	20.03.057												
4.	Vidella Setya Kanti	20.03.069												
5.	Salwa Annisa	20.03.093												
6.	M Fauzan D	20.03.095												
7.	Alnugrah Fadhil	20.03.100											IZIN	

ABSENSI KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM														
NO	NAMA	NRP	MARET											
			1	2	3	8	9	10	15	16	17			
1.	Dennia Putri Humaira	20.03.012												
2.	Egidia Regita Putri K	20.03.014												
3.	Muhammad Ridhwan	20.03.057												
4.	Vidella Setya Kanti	20.03.069												
5.	Salwa Annisa	20.03.093												
6.	M Fauzan D	20.03.095												
7.	Alnugrah Fadhil	20.03.100											IZIN	

ABSENSI KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM													
NO	NAMA	NRP	MARET										
			22	23	24	29	30	31	15	16	17		
1.	Dennia Putri Humaira	20.03.012	UTS										
2.	Egidia Regita Putri K	20.03.014											
3.	Muhammad Ridhwan	20.03.057											
4.	Vidella Setya Kanti	20.03.069											
5.	Salwa Annisa	20.03.093											
6.	M Fauzan D	20.03.095											
7.	Alnugrah Fadhil	20.03.100											

ABSENSI KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM										
NO	NAMA	NRP	APRIL							
			5	6	7	12	13	14		
1.	Dennia Putri Humaira	20.03.012								
2.	Egidia Regita Putri K	20.03.014								
3.	Muhammad Ridhwan	20.03.057								
4.	Vidella Setya Kanti	20.03.069								
5.	Salwa Annisa	20.03.093							IZIN	
6.	M Fauzan D	20.03.095								
7.	Alnugrah Fadhil	20.03.100								

## D. Rundown Pelaksanaan Program

### 1. Sejalan Informal (Sejahterakan dan Lindungi Sektor Informal)

#### a. Sosialisasi

Lampiran 4.1.1 Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Sabtu, 6 Mei 2023	08.00 – 08.10	Pembukaan MC	MC
2		08.10 – 08.15	Sambutan Kepala Kelurahan	Lurah
3		08.15 – 09.15	Pemaparan Materi 1	BPJS Ketenagakerjaan
4		09.15 – 10.15	Pemaparan Materi 2	Dinsos Kota Bandung
5		10.15 – 10.30	Quiz	MC
6		10.30 – 11.30	Sesi Tanya Jawab	Narasumber
7		11.30 – 11.35	Kesimpulan	MC
8		11.35 – 11.45	Dokumentasi	Panitia
9		11.45 – 11.55	Penutup	MC

#### b. Pemasangan Wifi

Lampiran 4.1.2 Rundown Pelaksanaan Program  
Pemasangan Wifi

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	PJ
1	Minggu, 7 Mei 2023	08.00 – 08.10	Pembukaan	Lurah
2		08.10 – 09.30	Diskusi dan Pemetaan	Lurah
3		09.30 – 09.45	Persiapan Dokumen Persyaratan	Lurah
4		09.45 – 10.00	Menuju Kantor Pelayanan	Kelurahan
5		10.00 – 10.30	Pendaftaran	Kelurahan

6		10.30 – 10.45	Menuju Kantor Kelurahan	Kelurahan
7		10.45 – 15.00	Pemasangan Provider	Kelurahan
8		15.00 – 16.00	Uji Kelayakan	Panitia

**c. Kunjungan Perusahaan**

*Lampiran 4.1.3 Rundown Pelaksanaan Program Kunjungan Perusahaan*

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	PJ
1	Jum'at, 5 Mei 2023	07.00 – 07.10	Pembukaan	Lurah
2		07.10 – 08.00	Diskusi dan Pemetaan	Lurah
3		08.00 – 11.00	Kunjungan Perusahaan	Kelurahan
4		11.00 – 13.00	ISHOMA	Kelurahan
5		13.00 – 16.00	Kunjungan Perusahaan	Kelurahan
6		16.00 – 16.45	Evaluasi	Lurah

**2. Program sosialisasi dan pelatihan tentang mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan pemerintah di Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung**

*Lampiran 4.2 Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pelatihan Prosedur Pelayanan Pemberian Dana Bantuan Sosial*

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Sabtu, 13 Mei 2023	08.00 – 08.10	Pembukaan MC	MC
2		08.10 – 08.15	Sambutan Kepala Kelurahan	Lurah
3		08.15 – 09.15	Pemaparan Materi 1	Kelurahan Cicaheum
4		09.15 – 10.15	Pemaparan Materi 2	Dinsos Kota Bandung
5		10.15 – 10.30	Quiz	MC

6		10.30 – 11.30	Sesi Tanya Jawab	Narasumber
7		11.30 – 11.35	Kesimpulan	MC
8		11.35 – 11.45	Dokumentasi	Panitia
9		11.45 – 11.55	Penutup	MC

### 3. Program sosialisasi program kemasyarakatan dan peningkatan kualitas TP PKK Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung

*Lampiran 4.3 Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi Peningkatan Kualitas TP PKK Kelurahan Cicaheum*

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Sabtu, 20 Mei 2023	08.00 – 08.10	Pembukaan MC	MC
2		08.10 – 08.15	Sambutan Kepala Kecamatan	Camat
3		08.15 – 08.20	Sambutan Kepala Kelurahan	Lurah
4		08.20 – 09.20	Pemaparan Materi 1	Camat Kiaracandong
5		09.20 – 10.20	Pemaparan Materi 2	Dinsos Kota Bandung
6		10.20 – 10.45	Quiz	MC
7		10.45 – 11.45	Sesi Tanya Jawab	Narasumber
8		11.45 – 11.50	Kesimpulan	MC
9		11.50 – 11.55	Dokumentasi	Panitia
10		11.55 – 12.00	Penutup	MC

**4. Program sosialisasi dan peningkatan kualitas keamanan serta ketertiban di wilayah Kelurahan Cicaheum, Kota Bandung**

*Lampiran 4.4 Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keamanan Wilayah Kelurahan Cicaheum*

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Sabtu, 27 Mei 2023	08.00 – 08.10	Pembukaan MC	MC
2		08.10 – 08.15	Sambutan Kepala Kelurahan	Lurah
3		08.15 – 09.15	Pemaparan Materi 1	Polres Kecamatan
4		09.15 – 10.15	Pemaparan Materi 2	Dinsos Kota Bandung
5		10.15 – 10.30	Quiz	MC
6		10.30 – 11.30	Sesi Tanya Jawab	Narasumber
7		11.30 – 11.35	Kesimpulan	MC
8		11.35 – 11.45	Dokumentasi	Panitia
9		11.45 – 11.55	Penutup	MC

**5. Kegiatan sosialisasi pemberian edukasi kepada pihak industri dan masyarakat terkait pentingnya peduli lingkungan sekitar**

*Lampiran 4.5 Rundown Pelaksanaan Program Sosialisasi  
Peduli Lingkungan Sekitar*

No	Hari/tanggal	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Sabtu, 3 Juni 2023	08.00 – 08.10	Pembukaan MC	MC
2		08.10 – 08.15	Sambutan Kepala Kelurahan	Lurah
3		08.15 – 09.15	Pemaparan Materi 1	Dinas Lingkungan Hidup
4		09.15 – 10.15	Pemaparan Materi 2	Dinsos Kota Bandung
5		10.15 – 10.30	Quiz	MC
6		10.30 – 11.30	Sesi Tanya Jawab	Narasumber
7		11.30 – 11.35	Kesimpulan	MC
8		11.35 – 11.45	Dokumentasi	Panitia
9		11.45 – 11.55	Penutup	MC

## E. Keterangan dan Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 5.1 Dokumentasi Kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial

No	Hari, Tanggal	Keterangan Kegiatan	Dokumentasi
<b>PROFIL ANALIS JAMINAN SOSIAL</b>			
1.	Rabu, 02/02/2023	<b>Pembekalan</b> Membahas tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia, oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE selaku perencana ahli muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas	
2.	Kamis, 09/02/2023	<b>Pencarian Isu</b> Pencarian isu dilaksanakan di kantor kelurahan dan kemudian melakukan penjajakan ke wilayah dan bertemu masyarakat	
3.	Jumat, 10/02/2023	<b>Assesment</b> Melakukan assesment dengan didampingi oleh pendamping lapangan untuk memastikan kebenaran isu yang ada sekaligus melakukan wawancara.	
4.	Tentatif	<b>Penyusunan Rencana Intervensi</b>	-

Lampiran 5.2 Dokumentasi Kegiatan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Hari, Tanggal	Keterangan Kegiatan	Dokumentasi
<b>PROFIL ANALIS SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL</b>			
1	Rabu 22/02/2023	<b>Pembekalan</b> Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri Bapak Toton Heriyanto selaku CSE Manager PT. AAPC Indonesia. Membahas Tentang peningkatan Kompetensi analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.	
2	Kamis, 09/02/2023	<b>Pencarian Isu</b> Pencarian isu dilaksanakan dengan melakukan penjajakan wilayah cicaheum dan bertemu dengan beberapa stakeholder.	
3	Jumat, 24/02/2023	<b>Assesment</b> Melakukan assesment dengan didampingi oleh pendamping lapangan untuk memastikan kebenaran isu yang ada sekaligus melakukan wawancara.	
4	Tentatif	<b>Penyusunan Rencana Intervensi</b>	-

No	Hari, Tanggal	Keterangan Kegiatan	Dokumentasi
<b>PROFIL ANALIS PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			
1.	Rabu 08/03/2023	<b>Pembekalan</b> Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi / industri oleh Bapak Samsul Maarif selaku Project Manager YUM Kab. Cianjur Membahas tentang peningkatan kompetensi analisis pemberdayaan sosial.	
2.	Kamis, 09/02/2023	<b>Pencarian Isu</b> Pencarian isu dilaksanakan dengan melakukan penjajakan wilayah cicaheum dan bertemu dengan beberapa stakeholder.	
3.	Jumat, 10/03/2023	<b>Assesment</b> Melakukan assesment dengan didampingi oleh pendamping lapangan untuk memastikan kebenaran isu yang ada sekaligus melakukan wawancara.	
4.	Tentatif	<b>Penyusunan Rencana Intervensi</b>	-

Lampiran 5.4 Dokumentasi Kegiatan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial





No	Hari, Tanggal	Keterangan Kegiatan	Dokumentasi
<b>PROFIL ANALIS PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>			
1.	Jum'at 24/03/2023	<b>Pembekalan</b> Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Bapak Ade Reno, AKS., MSW selaku Deputy 1 CEO Islamic Relief Indonesia Membahas tentang peningkatan kompetensi ahli Penataan Lingkungan Sosial,	
2.	Kamis, 09/02/2023	<b>Pencarian Isu</b> Pencarian isu dilaksanakan dengan melakukan penjajakan wilayah cicaheum dan bertemu dengan beberapa stakeholder.	
3.	Jumat, 10/03/2023	<b>Assesment</b> Melakukan assesment dengan didampingi oleh pendamping lapangan untuk memastikan kebenaran isu yang ada sekaligus melakukan wawancara.	
4.	Tentatif	<b>Penyusunan Rencana Intervensi</b>	-

Lampiran 5.5 Dokumentasi Kegiatan Profil Analisis  
Penganggulangan Bencana

No	Hari, Tanggal	Keterangan Kegiatan	Dokumentasi
<b>PROFIL ANALIS PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1.	Jum'at 24/03/2023	<b>Pembekalan</b> Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana	
2.	Kamis, 09/02/2023	<b>Pencarian Isu</b> Pencarian isu dilaksanakan dengan melakukan penjajakan wilayah cicaheum dan bertemu dengan beberapa stakeholder.	
3.	Jumat, 10/03/2023	<b>Assesment</b> Melakukan assesment dengan didampingi oleh pendamping lapangan untuk memastikan kebenaran isu yang ada sekaligus melakukan wawancara.	
4.	Tentatif	<b>Penyusunan Rencana Intervensi</b>	-

## E. Kegiatan Supervisi dan Bimbingan

### Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Supervisi dan Bimbingan

KEGIATAN SUPERVISI DAN BIMBINGAN			
1.	Jumat, 27/01/2023	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing pemaparan mekanisme kerja lapangan (1)	
2.	Rabu, 22/02/2023	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing persiapan supervisi lembaga (2)	
3.	Kamis, 23/02/2023	Supervisi Lembaga	
4.	Kamis, 02/03/2023	Supervisi dari Dosen Pembimbing	
5.	Kamis, 30/03/2023	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing untuk konsultasi terkait isu yang dikaji (3)	